



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
( RENSTRA - PD )

TAHUN 2021 - 2026



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG  
Jl. HOS Cokroaminoto No. 3 Pemalang

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ini.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang yang relevan, sehingga isi di dalamnya telah sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Pemalang secara umum. Dengan keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai unsur pelaksana pembangunan serta menekan sekecil mungkin kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi.

Demikian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, semoga dapat bermanfaat secara internal bagi dinas maupun semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Pemalang, September 2021

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PEMALANG



AMRULLAH, S.IP,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650215 198603 1 013

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum .....	9
1.3. Maksud dan Tujuan .....	11
1.4. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN .....</b>	<b>14</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.....	14
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang .....	41
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang .....	44
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang .....	67
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN .....</b>	<b>70</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.....	70
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	71
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	77
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	81
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	82
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>84</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.....	84
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	
5.1. Strategi.....	86
5.2. Arah Kebijakan .....	86
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>88</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>126</b>
<b>BAB VIII . PENUTUP .....</b>	<b>138</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	41
Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan...	42
Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan .....	42
Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon .....	42
Tabel 2.5. Inventaris Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.....	43
Tabel 2.6. Kuota angkutan perkotaan .....	45
Tabel 2.7. Jumlah Armada Angkutan Perkotaan .....	46
Tabel 2.8. Kuota Angkutan Pedesaan .....	49
Tabel 2.9. Jumlah Armada Angkutan Pedesaan .....	50
Tabel 2.10. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang Melintas di Wilayah Kabupaten Pemalang.	52
Tabel 2.11. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Terminal Induk Pemalang .....	53
Tabel 2.12. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Induk Pemalang .....	53
Tabel 2.13. Data Rambu Lalu Lintas .....	54
Tabel 2.14. Persentase KBWU yang di Uji Kir .....	57
Tabel 2.15. Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas dan kerugiannya pada tahun 2020 .....	58
Tabel 2.16. Kondisi Infrastruktur Sempul Terminal Penumpang Tipe C.....	60
Tabel 2.17. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan (SPP) Terminal Penumpang Tipe C .....	60
Tabel 2.18. Persentase Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan (SPP) Terminal Penumpang Tipe C.....	61
Tabel 2.19. Load Factor trayek angkutan tahun 2020 .....	62
Tabel 2.20. V/C ratio di ruas jalan kewenangan kabupaten .....	62
Tabel 2.21. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan .....	63
Tabel 2.22. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.....	64
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan .....	70
Tabel 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati .	74
Tabel 3.3. Telaah Renstra Kementerian Perhubungan.....	78
Tabel 3.4. Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi	

	Jawa Tengah.....	80
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan .....	85
Tabel 5.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.....	87
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.....	93
Tabel 6.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs .....	122
Tabel 6.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 .....	122
Tabel 6.4	RAD SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 .....	124
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.....	127
Tabel. 7.2	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub KegiatanDinas Perhubungan Kabupaten Pemalang .....	128

## **DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Peta wilayah Kabupaten Pemalang.....	2
Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 .....	8
Gambar 1.3 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	9
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .....	17
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor .....	18
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran.....	18

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kabupaten Pemalang terletak pada 109° 11' 13.452" – 109° 35' 45.969" Bujur Timur (BT) dan 6° 46' 22.17" – 7° 14' 55.879" Lintang Selatan (LS) dengan luas wilayah 1.115,30 Km<sup>2</sup>.

Secara administratif Kabupaten Pemalang berbatasan langsung dengan :

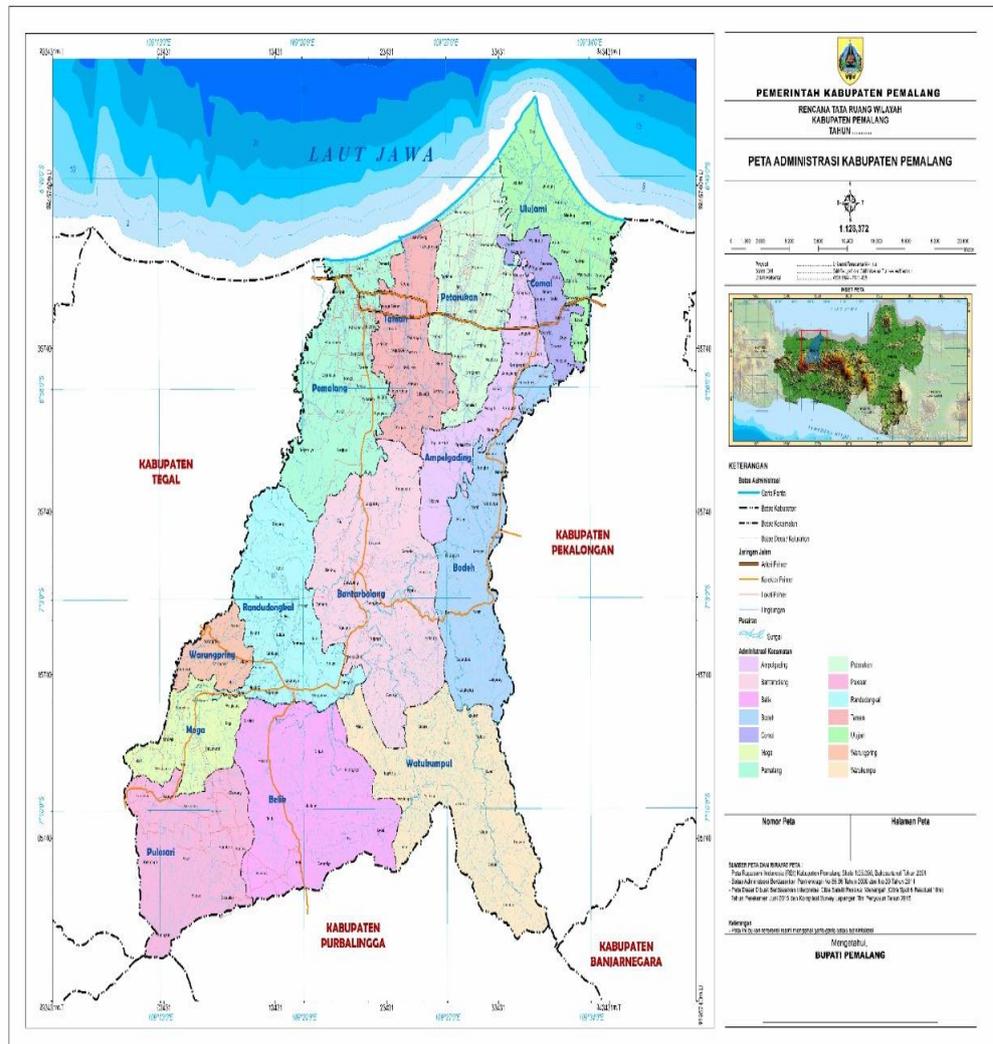
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Barat : Kabupaten Tegal

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur pantai utara (pantura) Pulau Jawa dengan ibu kota di kawasan perkotaan Pemalang. Lokasi Kabupaten Pemalang sangat strategis karena berada pada jalur pengembangan pembangunan poros Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya.

Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sebesar 1.502.646 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 764.805 jiwa (50,90%) dan jumlah penduduk perempuan sebesar 737.841 jiwa (49,10%). Secara administratif Kabupaten Pemalang saat ini terbagi menjadi 14 Kecamatan. Wilayah itu terdiri atas 211 desa dan 11 kelurahan.

Batas wilayah administratif Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut :

Gambar 1.1 Peta wilayah Kabupaten Pemalang



Sumber : Peta RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 – 2038

Dengan kondisi di atas dipastikan akan menyebabkan tingginya beban kota terhadap kebutuhan transportasi. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan keuangan merupakan penghambat utama untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kota. Kemacetan merupakan indikator tidak memadainya sarana dan prasarana kota, khususnya menyangkut sarana dan prasarana transportasi.

Urusan perhubungan di Kabupaten Pemalang terdapat 33 jaringan trayek Angkutan orang dengan 602 kendaraan umum dalam trayek sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Pemalang, Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/308 Tahun 2021 tentang Penetapan Tipe dan Lokasi Terminal Penumpang di Kabupaten Pemalang terdapat Terminal Tipe C sebanyak 8 terminal. Namun demikian beberapa terminal kondisinya belum memenuhi persyaratan minimal operasional terminal dan secara fisik fasilitas utama serta pendukungnya mengalami kerusakan, hanya ada 2 Terminal yang layak sebagai terminal tipe C, yaitu Terminal Belik dan Terminal Randudongkal.

Selain pada pemenuhan angkutan umum dan simpul-simpul transportasi juga ada sektor pengujian kendaraan bermotor, pengelolaan parkir tepi jalan umum dan pemenuhan sarana prasarana perlengkapan jalan, dimana sektor-sektor tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat.

Program Pengelolaan Pelayaran mendasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017, terdapat 1 pelabuhan pengumpan lokal. Berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038, rencana hierarki pelabuhan sebagai pelabuhan pengumpan regional sejumlah 1 pelabuhan, dimana proses sampai saat ini baru pada pemenuhan administrasi dan persiapan lahan pelabuhan pengumpan lokal.

Adapun pembagian urusan dan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam urusan perhubungan memiliki kewenangan yaitu :

1. Sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
  - b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
  - c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
  - d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.

- e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
  - f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.
  - g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
  - h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.
  - i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota.
  - j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
  - k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
  - l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.
  - m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
  - n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
  - o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
  - p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.
2. Sub Urusan Pelayaran dengan urusan sebagai berikut :
- a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota.
  - b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota.
  - c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang

- perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
- d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
  - e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
  - f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.
  - g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.
  - h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
  - i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.
  - j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
  - k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.
  - l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
  - m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
  - n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.
  - o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
  - p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
  - q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
  - r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
  - s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
3. Sub urusan Penerbangan  
Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

4. Sub urusan Perkeretaapian
  - a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.
  - b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
  - c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
  - d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.
  - e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
  - f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota.
  - g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Tantangan dan permasalahan dalam pelayanan urusan perhubungan secara nasional, umumnya masih dihadapkan pada peningkatan infrastruktur, kelancaran dan keselamatan mobilitas angkutan darat, laut dan udara, serta aksebilitas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai.

Adapun permasalahan secara regional adalah rendahnya konektivitas antar kawasan pengembangan khususnya pada kawasan Brebes Tegal Slawi Pemalang (Bregasmalang), belum optimalnya simpul transportasi khususnya terminal penumpang umum, terbatasnya ruang pergerakan serta tingginya jumlah pertumbuhan kendaraan pribadi dan rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum dengan masih banyaknya kendaraan angkutan umum berusia teknis di atas 20 tahun yang beroperasi.

Terbatasnya pendanaan pemerintah daerah untuk pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan, tingkat ketersediaan armada angkutan yang masih sangat terbatas dalam mengakomodasi pergerakan barang dan penumpang khususnya pada wilayah-wilayah terpencil, menjadi salah

satu faktor yang membuat masyarakat kurang dapat berkembang.

Renstra Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar bidang Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Perhubungan telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah lain dan pemangku kepentingan yang disusun melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Renstra dinas perhubungan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dan merupakan dokumen rencana pembangunan yang implementatif mengacu pada penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

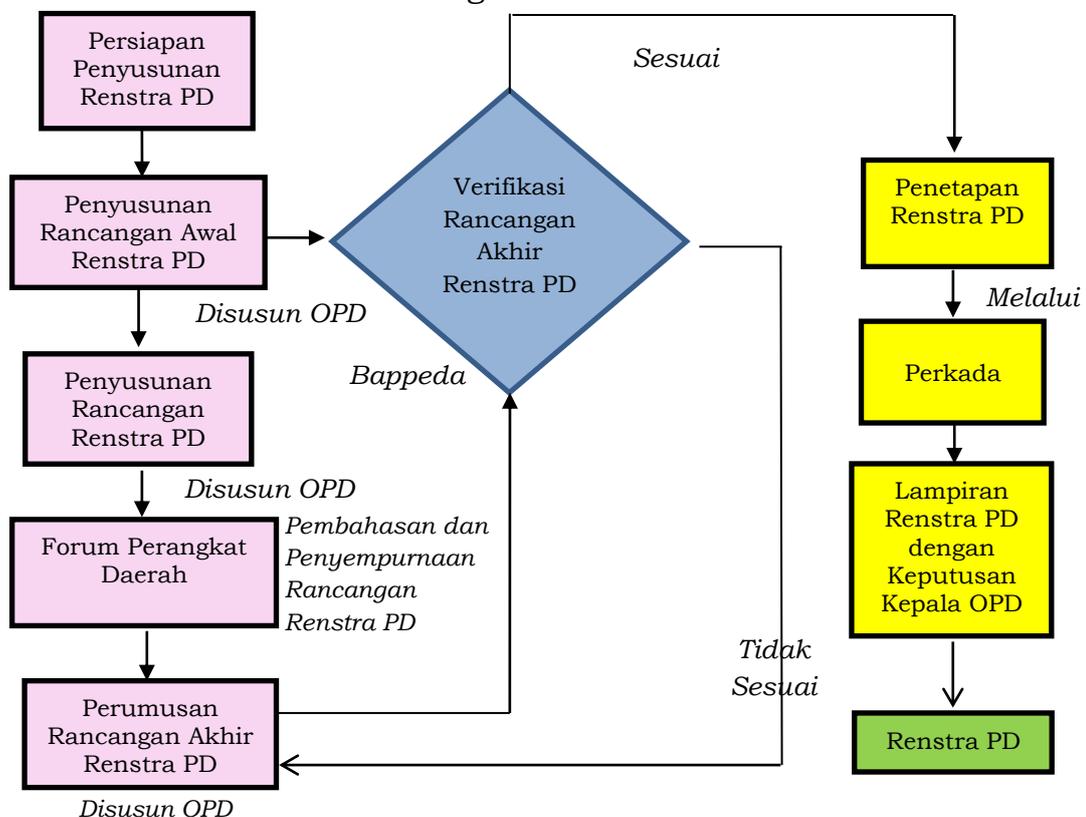
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan terpilihnya Kepala Daerah baru maka renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 perlu disusun.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan yang komprehensif jangka waktu lima tahun dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026 sebagai dokumen perencanaan di Kabupaten Pemalang.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disajikan dalam bagan berikut

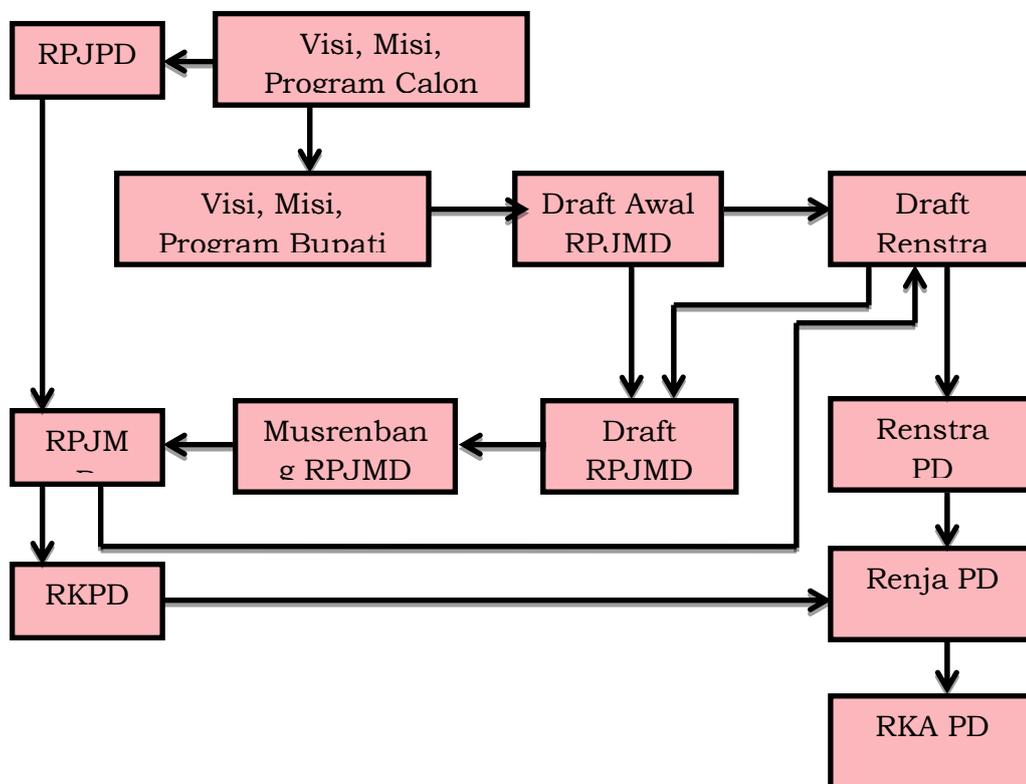
Gambar 1.2  
Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut:

Gambar 1.3  
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- g. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
- o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- p. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD);

- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pemutakhirannya;
- t. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020;
- u. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat
- v. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang
- w. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026
- x. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
- y. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- z. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
- aa. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan di urusan Perhubungan selama 5 tahun dengan mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang untuk dilaksanakan seluruh stakeholder.

Adapun tujuan dari Renstra sebagai berikut :

1. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah yang terkait dengan bidang tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
3. Memudahkan Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan
4. Memudahkan jajaran pada pelaksana satuan kerja Dinas Perhubungan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang, sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang.
3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang.
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang dalam 5 (lima) tahun mendatang.
6. Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, berisi rencana program, kegiatan dan

sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
8. Bab VIII Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

##### **1. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;

##### **2. Fungsi**

Didalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi di bidang perhubungan;
- e. Pembinaan terhadap UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dalam lingkup Dinas Perhubungan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2020, bahwa kewenangan desentralisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah urusan Wajib Non Pelayanan Dasar urusan perhubungan;

### **3. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang pada Bagian Keempat Pasal 15, menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Bina Program dan Keuangan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Angkutan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Angkutan Penumpang dan Barang;
  - 2) Seksi Pengendalian, Operasional dan Keselamatan;
- d. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
  - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
- e. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
  - 1) Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran;
  - 2) Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yaitu urusan Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan pada :

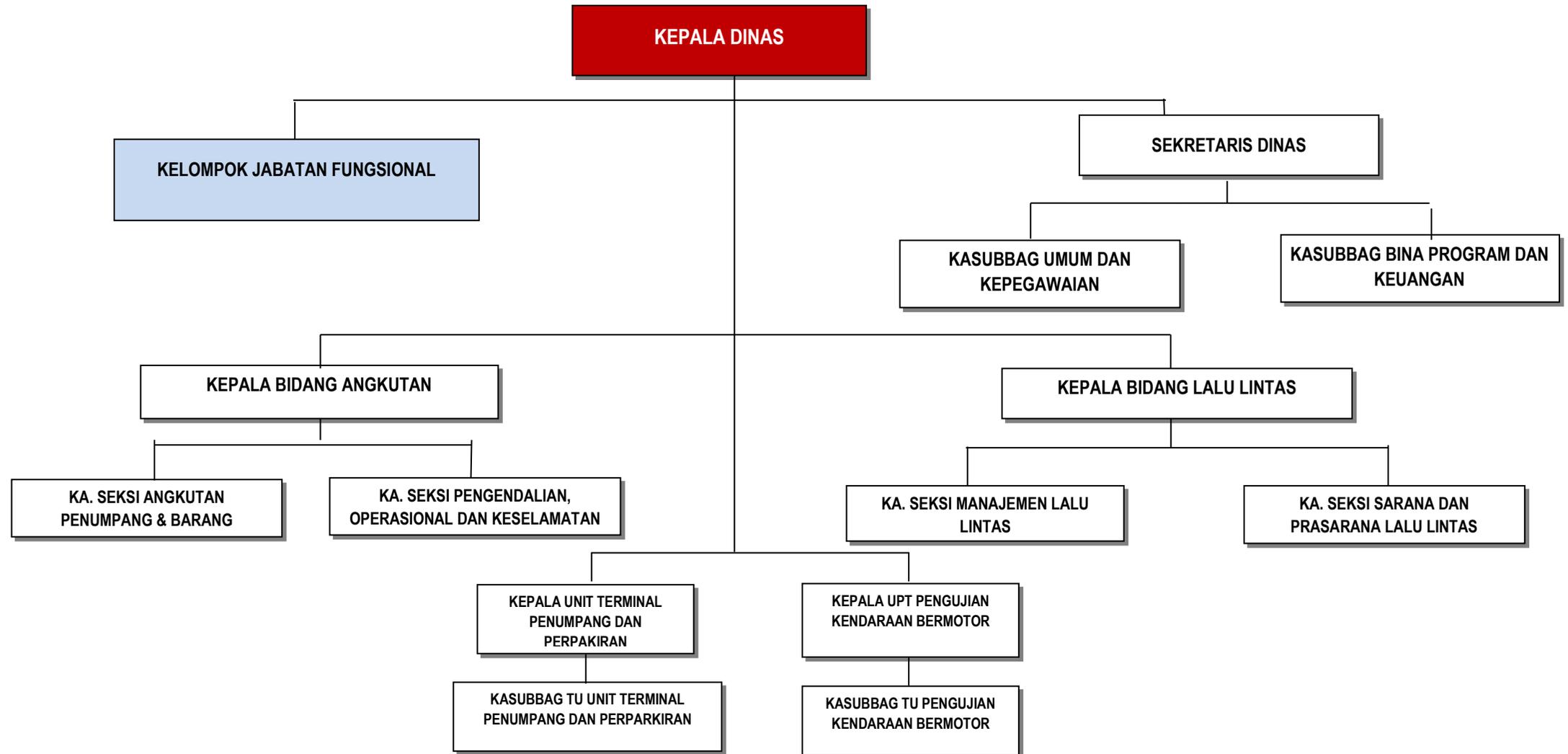
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan

Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;

5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang dan Perpajakan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.

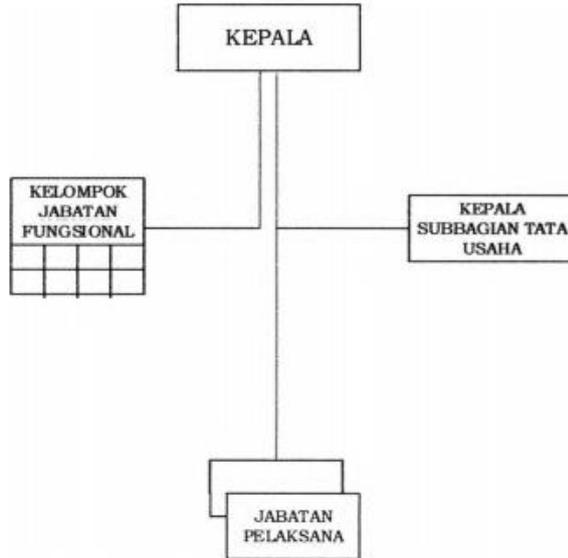
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

**Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN**

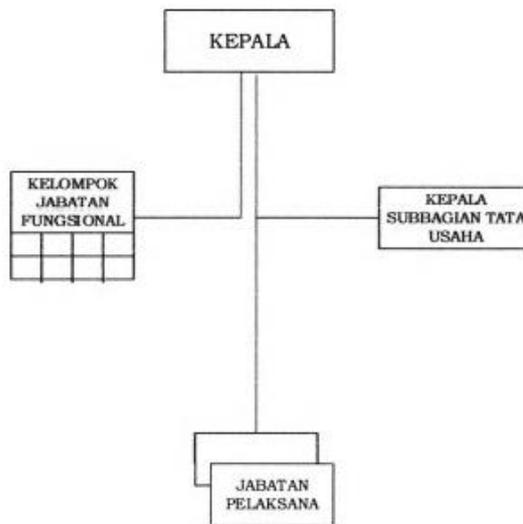


Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 Sesuai dengan Perbup yang ada termasuk Untuk UPT dan UTPP

Gambar 2.2 STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



Gambar 2.3 STRUKTUR ORGANISASI UNIT TERMINAL PENUMPANG DAN PERPARIRAN



Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang disebutkan bahwa Dinas Perhubungan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang

Perhubungan. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang melalui kepala dinas sebagai pimpinan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu :

1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
3. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
4. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
5. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
6. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.
7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
8. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.
9. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota.
10. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
11. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
12. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.
13. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
14. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

15. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
  16. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota..
- b. Sub Urusan Pelayaran, yaitu :
1. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah,
  2. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah,
  3. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha,
  4. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah,
  5. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha,
  6. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan daerah dan/ atau jaringan,
  7. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah,
  8. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
  9. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah,
  10. Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan

- (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau,
11. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau,
  12. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal,
  13. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal,
  14. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal,
  15. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,
  16. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,
  17. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal
- c. Sub Urusan Penerbangan yaitu penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter
- d. Sub Urusan Perkeretaapian, yaitu:
1. Penetapan rencana induk perkeretaapian daerah,
  2. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah,
  3. Penetapan jaringanjalur kereta api yang jaringannya dalam 1(satu) daerah,
  4. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api,
  5. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah,
  6. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian,
  7. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah

Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan ruang lingkupnya (teknis dibidang perhubungan);
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya (pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan);
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya (penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan);
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya (koordinasi dan fasilitasi di bidang perhubungan);
- 5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Pemalang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 tahun 2016 dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **A. Kepala Dinas Perhubungan**

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang Perhubungan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
2. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang

- Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Perhubungan sesuai dengan program dan kegiatan bidang Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
  4. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Perhubungan sesuai dengan pedoman pelaksanaan agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
  5. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang Perhubungan berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
  6. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang Perhubungan sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
  7. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang Perhubungan sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi,
  8. Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Perhubungan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
  9. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Perhubungan sesuai dengan rencana

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja.

10. Merumuskan laporan urusan Perhubungan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati,
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

## **B. Sekretaris**

Sekretaris Dinas Perhubungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Mengkoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang Perhubungan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. Mengoordinasikan penyediaan dan

- pelayarian informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
6. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perikanan sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
  7. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
  8. Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
  9. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja.
  10. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang Perhubungan berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi
    - a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut
      - 1) Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran

- 2) Menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang perhubungan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi
- 4) Mengelola data urusan pemerintahan bidang perhubungan melalui sistem informasi pembangunan daerah guna pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
- 5) Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan,
- 6) Menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan panduan pembuatan laporan sebagai bahan pertanggungjawaban
- 7) Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi,

- 8) Menyiapkan bahan inovasi Sub Bagian Bina Program dan Keuangan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
  - 9) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
  - 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
  - 11) Menyusun bahan laporan urusan pemerintahan bidang perhubungan berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
  - 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan Keuangan secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
  - 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi
- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut
- 1) Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
  - 2) Mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan

- kearsipan secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- 3) Mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas
  - 4) Mengelola administrasi kerumah tanggaan meliputi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas, dan barang milik daerah secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
  - 5) Mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja sesuai dengan target kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas,
  - 6) Mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi,
  - 7) Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
  - 8) Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
  - 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
  - 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian

secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan

- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

### **C. Kepala Bidang Angkutan**

Kepala Bidang Angkutan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Angkutan sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun rancangan kebijakan Bidang Angkutan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Angkutan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4. Menyusun rancangan inovasi Bidang Angkutan berdasarkan identifikasi permasalahan guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Angkutan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

- a. Kepala Seksi Angkutan Penumpang dan Barang Kepala Seksi Angkutan Penumpang dan Barang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. Merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Angkutan Penumpang dan Barang sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
  - b. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan Seksi Angkutan Penumpang dan Barang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
  - c. Menyusun bahan kebijakan angkutan yang meliputi rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan, rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan perdesaan, rencana umum jaringan lintas angkutan barang, wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi, tarif kelas ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pengendalian dan pedoman pelaksanaan tugas,
  - d. Menyusun bahan pertimbangan teknis penzinaan Usaha Angkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai bahan pengendalian,
  - e. Menyiapkan bahan inovasi Seksi Angkutan Penumpang dan Barang berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
  - f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Seksi Angkutan Penumpang

dan Barang sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja, dan

- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan Penumpang dan Barang secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi
- b. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
  - b. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
  - c. Melaksanakan kegiatan pengendalian angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, angkutan hewan, dan angkutan khusus,
  - d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi bidang pengendalian operasional dan keselamatan yang meliputi Standar Pelayanan pada angkutan umum dan Sistem Manajemen Keselamatan,
  - e. Melaksanakan kegiatan pelatihan safety drifting terhadap pengemudi angkutan

- kota sesuai aturan lalu lintas guna meningkatkan kedisiplinan berkendara,
- f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi tarif angkutan sesuai dengan kebijakan tarif yang telah ditetapkan,
  - g. Merencanakan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia,
  - h. Menyiapkan bahan inovasi Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
  - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
  - j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

#### **D. Kepala Bidang Lalu Lintas**

Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai uraian tugas sebagai berikut

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Lalu Lintas yang meliputi rencana induk jaringan

Lalu Lintas Kabupaten, rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kabupaten, analisis dampak lalu lintas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas yang meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas, peyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, pengendalian dan pengawasan lalu lintas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar tepat sasaran dan tujuan,
4. Menyusun rancangan inovasi Bidang Lalu Lintas berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas peayan publik,
5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas denga unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi
  - a. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas memiliki uraian tugas sebagai berikut
    - 1) Merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan pedoman pelak sanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
    - 2) Menyiapkan bahan rancangan kebijakan Seksi Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan

- tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3) Melaksanakan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan dan prosedur keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas,
  - 4) Menyusun bahan pengembangan manajemen keamanan dan keselamatan lalu lintas,
  - 5) Melakukan analisa terhadap volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan sebagai bahan penyusunan rencana umum jaringan jalan kota,
  - 6) Melaksanakan pemantauan terhadap arus lalu lintas di kawasan tertentu dan persimpangan,
  - 7) Menyiapkan bahan inovasi Seksi Manajemen Lalu Lintas berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
  - 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
  - 9) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
  - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi
- b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kepala Seksi Sarana dan Prasarana memiliki uraian tugas sebagai berikut
- 1) Merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

- sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2) Menyiapkan bahan rancangan kebijakan Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
  - 3) Menyusun perencanaan perlengkapan jalan kabupaten dengan melaksanakan survey dan identifikasi untuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan ,
  - 4) Melaksanakan kegiatan pemasangan/pembuatan marka jalan, rambu-rambu, nama jalan dan perlengkapan jalan raya dan transportasi darat sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan,
  - 5) Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan jalan secara teratur dan berkala agar dapat berfungsi dengan baik,
  - 6) Melaksanakan pengawasan, perawatan pengadaan dan penempatan rambu-rambu dan fasilitas jalan ,
  - 7) Mengelola penyediaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan prosedur untuk menjamin berfungsinya semua perlengkapan dan rambu-rambu lalu lintas,
  - 8) Menyiapkan bahan inovasi Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan Identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
  - 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Seksi Sarana dan Prasarana sesuai dengan rencana program dan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,

10) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

E. Kepala UPKB Kepala UPKB mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan pengelolaan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. Menyusun konsep pengelolaan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
4. Melaksanakan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor sesuai pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin obyektifitas hasil pengujian kendaraan bermotor yang tepat dan akurat;
5. Melaksanakan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi dan mencegah adanya pungutan liar;
6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor secara intensif dan terintegrasi untuk menjamin

obyektivitas pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;

7. Menyusun data informasi pengelolaan UPKB guna pengambilan kebijakan;
8. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada UPKB sesuai pedoman pelaksanaan untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan;
9. Menyiapkan bahan inovasi UPKB berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan UPKB sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan pada UPKB sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Membuat usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada UPKB dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi pada UPKB sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
- d. Menginventarisir data informasi pengelolaan UPKB guna pengambilan kebijakan;

- e. Mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. Mengelola administrasi kerumah tanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPKB secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas
- g. Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Tata Usaha pada UPKB berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha pada UPKB sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- i. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha pada UPKB sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

#### F. Kepala UTPP

Kepala UTPP mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan UTPP sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. Menyusun konsep kebijakan manajemen pengelolaan terminal penumpang dan pengelolaan perparkiran sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran sesuai dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan ;

4. Menyusun dan menganalisa data yang meliputi terminal penumpang dan perparkiran sebagai bahan penyusunan kebijakan manajemen terminal penumpang dan perparkiran;
5. Melaksanakan pengendalian ketertiban terminal melalui pengaturan kendaraan yang berada dalam terminal, pengaturan ketertiban lalu lintas dalam dan sekitar terminal dan pangkalan di wilayahnya;
6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran secara efektif untuk ketertiban dan menjaga kualitas pelayanan perparkiran;
7. Menyusun bahan pertimbangan teknis rekomendasi perizinan pengelolaan parkir, penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum ;
8. Melaksanakan pembinaan melalui bimbingan penyuluhan kepada pengelola parkir dan/atau petugas parkir;
9. Melaksanakan penyusunan, pengendalian dan pengawasan jam perjalanan (time table) pemberangkatan angkutan penumpang umum di Terminal;
10. Melaksanakan pemungutan retribusi di lingkungan terminal dan retribusi perparkiran sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan pendapatan asli daerah;
11. Merencanakan penyediaan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal dan perparkiran sesuai pedoman pelaksanaan untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan;
12. Menyiapkan bahan inovasi UTPP berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

13. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan UTPP sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha UTPP mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan pada UTPP sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada UTPP dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi pada UTPP sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
- d. Menyusun data informasi pengelolaan UTPP guna pengambilan kebijakan;
- e. Mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi;
- f. Mengelola administrasi kerumah tanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Tata Usaha pada UTPP berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna

meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

- h. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha pada UTPP sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya baik kualitas maupun kuantitas masih belum sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab tuntutan tugas, fungsi dan tanggungjawab.

Tabel 2.1.  
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Kepala	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekdin	1	-	-	-	-	1	1
3	Kabid	1	-	-	-	-	1	1
4	Ka. UTP/UTPP	1	-	-	-	1	-	1
4	Kasubag	1	3	-	-	4	-	4
5	Kasi	2	1	-	-	3	-	3
6	JFU	57	1	12	38	8	-	58
7	JFT	4	-	-	1	3	-	4
8	Non ASN	114	36	-	-	-	-	150
Jumlah		181	41	12	39	19	2	222

Sumber : Sekretariat Dishub, September 2021

Jumlah SDM Dinas Perhubungan saat ini sebanyak 222 orang, ASN berjumlah 72 orang dan 150 orang Non ASN, 181 orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan 41 orang. Dari ASN sebanyak 72 orang terdiri dari 12 orang golongan I, 39 orang golongan II, 19 orang golongan III, 2 orang golongan IV.

Tabel 2.2.  
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim II	-	-	-
1	Diklatpim III	2	2	-
2	Diklatpim IV	1	1	-
3	ADUM	-	-	-
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat	7	3	4
Jumlah		10	6	4

Sumber : Sekretariat Dishub, September 2021

Dari jumlah Pejabat Struktural Dinas Perhubungan yang saat ini sebanyak 10 orang, terdapat 7 orang yang belum melaksanakan Diklat Kepemimpinan yaitu 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.

Tabel 2.3.  
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	5	4	1
2	Sarjana (S1)	12	8	4
3	Diploma	6	6	-
4	SLTA	22	22	-
5	SLTP	15	15	-
6	SD	12	12	-
Jumlah		72	67	5

Sumber : Sekretariat Dishub, September 2021

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah 72 orang ASN dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Sari terbanyak memiliki tingkat pendidikan SLTA sebanyak 22 orang semuanya laki-laki disusul urutan kedua, SLTP sebanyak 15 orang laki-laki, SD sebanyak 12 orang laki-laki, Sarjana (S1) sebanyak 12 orang ( 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan), selanjutnya Diploma sebanyak 6 orang semuanya laki-laki, dan terakhir dengan pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 5 orang (4 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan).

Tabel 2.4.  
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIB	-	-	-
2	IIIA	1	1	-
2	IIIB	1	1	-
3	IVA	6	4	2
4	IVB	2	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

Sumber : Sekretariat Dishub, September 2021

Jumlah ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Eselon terdiri dari Eselon IIIA berjumlah 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki, Eselon IIIB sebanyak 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki, Eselon IVA sebanyak 6 orang dengan jenis kelamin 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, Eselon IVB sebanyak 2 orang dengan perempuan.

#### b. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.  
Inventaris Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
<b>1.3</b>			<b>ASET TETAP</b>		<b>Rp 40.728.329.046</b>	
1	01		Tanah			
		01	Tanah	12	Rp 8.002.372.288	
<b>Jumlah KIB A</b>				<b>12</b>	<b>Rp 8.002.372.288</b>	
2	01		Peralatan dan Mesin			
		01	Alat-alat Besar	8	Rp 588.851.904	
		02	Alat-alat Angkutan	94	Rp 2.919.052.427	
		03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	19	Rp 849.194.000	
		04	Alat Pertanian	0	Rp -	
		05	Alat Kantor & Rumah Tangga	414	Rp 1.524.624.957	
		06	Alat Studio & Alat Komunikasi	87	Rp 793.258.065	
		07	Alat-alat Kedokteran	0	Rp -	
		08	Alat Laboratorium	2	Rp 202.280.000	
		09	Alat-alat persenjataan/keamanan	0	Rp -	
		10	Komputer	184	Rp 1.219.088.809	
		11	Rambu-rambu		Rp 8.449.445.832	
<b>Jumlah KIB B</b>				<b>922</b>	<b>Rp 16.545.795.994</b>	
3	03		Gedung dan Bangunan			
		01	Bangunan Gedung	69	Rp 12.396.360.864	
		02	Monumen	0	Rp -	
		03	Bangunan Menara	1	Rp 515.253.000	
		04	Tugu Titik Kontrol/pasti	0	Rp -	
<b>Jumlah KIB C</b>				<b>70</b>	<b>Rp 12.911.613.864</b>	
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan			
		01	Jalan & Jembatan	3	Rp 2.814.185.000	
		02	Bangunan Air/Irigasi	2	Rp 135.649.000	

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		03	Instalasi	2	Rp 84.891.000	
		04	Jaringan	4	Rp 130.785.000	
			<b>Jumlah KIB D</b>	<b>11</b>	<b>Rp 3.165.510.000</b>	
5	05		Aset Tetap Lainnya			
		01	Buku dan Perpustakaan	12	Rp 2.271.900	
		02	Barang Bercorak Kebudayaan	0		
		03	Hewan, Ternak dan Tanaman	0		
			<b>Jumlah KIB E</b>	<b>12</b>	<b>Rp 2.271.900</b>	
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan			
		01	Konstruksi dalam Pengerjaan	2	Rp 100.765.000	
			<b>Jumlah KIB F</b>	<b>2</b>	<b>Rp 100.765.000</b>	
		<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>			
2	02		Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	Rp -	
		03	Aset Tidak Berwujud			
		01	Aset Tidak Berwujud	4	Rp 150.783.000	
		04	Aset Lain-lain			
		01	Aset Lain-lain	52	Rp 176.660.625	
			<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>56</b>	<b>Rp 327.443.625</b>	
			<b>Jumlah Total</b>		<b>Rp 40.728.329.046</b>	

Sumber : Sekretariat Dishub, Desember 2020

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam renstra Dinas Perhubungan 2021-2026 telah disusun indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini hasil capaian kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026.

#### 1. Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pelayanan yang dapat diberikan Dinas Perhubungan Pemalang meliputi :

##### a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang telah menyediakan pelayanan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan dan jaringan trayek berupa angkutan perkotaan (137 kendaraan dalam 10 trayek), angkutan perdesaan (325

kendaraan dalam 20 trayek), angkutan perbatasan (30 kendaraan dalam 3 trayek). Selain itu juga tersedia bus yang melayani antar kota berupa Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP).

Perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terdiri dari Izin Trayek. Angkutan Umum dalam trayek yang ada di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1) Angkutan Perkotaan

a. Jumlah kuota angkutan perkotaan

Tabel 2.6.

Kuota angkutan perkotaan

No	Trayek	Kuota
1.	A : Terminal Induk – Sumberharjo PP	11
2.	B : Terminal Induk – Petarukan PP	26
3.	C : Terminal Induk – Widuri PP	6
4.	D : Terminal Induk – Sumberharjo PP	9
5.	E : Terminal Induk – Petarukan PP	25
6.	F : Terminal Induk – Sungapan PP	16
7.	G : Terminal Induk – Banjarmulya PP	10
8.	G1 : Terminal Induk – Banjarmulya PP	13
9.	H : Terminal Induk – Loning PP	14
10.	I : Terminal Induk – Jebed PP	15

b. Jumlah angkutan umum perkotaan

Kondisi jumlah armada / kendaraan angkutan umum perkotaan sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 cenderung meningkat, dari 93 kendaraan pada Tahun 2016, pada Tahun 2020 menjadi 130 kendaraan. Adapun data kendaraan dari Tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel 2.7.  
Jumlah Armada Angkutan Perkotaan

NO.	TRAYEK YANG DILAYANI	RUTE / LINTASAN	JUMLAH ANGKUTAN					KET.
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	<b>TRAYEK A</b>	Terminal Induk Kota Pemalang - Jl. Slamet Riyadi - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Jend. A Yani - Bojongbata - Sumberharjo - Bojongbata - Jl. Jend. A Yani - Jl. RE Martadinata - Jl. Veteran - Jl. Slamet Riyadi - Terminal Induk Kota Pemalang	9	12	12	13	13	
2	<b>TRAYEK B</b>	Terminal Induk Kota Pemalang - Jl. Slamet Riyadi - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Pemuda - Jl. Jend. A Yani - Jl. RE Martadinata - Jl. Veteran - Jl. Slamet Riyadi - Terminal Induk Kota Pemalang	18	26	29	30	31	
3	<b>TRAYEK C</b>	Terminal Induk Kota Pemalang - Jl. Slamet Riyadi - Jl. Jend. Sudirman - Beji - Jl. Jend. Sudirman - Jl. RE Martadinata - Widuri - Danasari - Bungin - Jl. Yos Sudarso - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Kenanga - Jl. Veteran - Jl. Slamet Riyadi - Terminal Induk Kota Pemalang	1	1	1	1	1	
4	<b>TRAYEK D</b>	Terminal Induk Kota Pemalang - Jl. Slamet Riyadi - Kl. Jend. A Yani - Jl. KH A Dahlan - Tambakrejo - Bojongnangka - Sumberharjo - Bojongnangka SMA Muhammadiyah - Jl. Cisadane -	1	1	1	0	0	

		Jl. KH Samanhudi - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Kenanga - Jl. Veteran - Jl. Slamet Riyadi - Terminal Induk Kota Pemalang						
5	<b>TRAYEK E</b>	Terminal Induk Kota Pemalang - Jl. Slamet Riyadi - Jl. Jend. Sudirman - Petarukan - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Jend. A Yani - Jl. KH A Dahlan - Jl. Cisadane - Jl. KH Samanhudi - Jl. RE Martadinata - Jl. Veteran - Jl. Slamet Riyadi - Terminal Induk Kota Pemalang	16	24	27	26	25	
6	<b>TRAYEK F</b>	Terminal Induk Kota Pemalang - Jl. Slamet Riyadi - Jl. Jend. Sudirman - Beji - Banjardawa - Penggarit - Paduraksa - Jl. Jend. A Yani - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Kenanga - Jl. Veteran - Jl. Slamet Riyadi - Terminal Induk Kota Pemalang	7	12	16	18	19	
7	<b>TRAYEK G</b>	Terminal Induk Kota Pemalang - Jl. Slamet Riyadi - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Jend. A Yani - Paduraksa - Banjarmulya - Kramat - Mengori - Bojongbata - Jl. Jend. A Yani - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Mawar - Jl. Kenaga - Terminal Induk Kota Pemalang	8	8	8	8	8	

8	<b>TRAYEK G1</b>	Terminal Induk Kota Pemalang - Jl. Slamet Riyadi - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Jend. A Yani - Bojombata - Mengori - Kramat - Banjarmulya - Paduraksa - Jl. Jend. A Yani - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Mawar - Jl. Slamet Riyadi - Terminal Induk Kota Pemalang	8	8	8	8	8	
9	<b>TRAYEK H</b>	Terminal Induk Kota Pemalang - Jl. Slamet Riyadi - Jl. Jend. Sudirman - Kabunan - Asemdayong - Loning - Asemdayong - Beji - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Urip Sumoharjo - Perum. Sugihwaras - Jl. Urip Sumoharjo - Alun-alun - Jl. Mawar - Jl. Slamet Riyadi - Terminal Induk Kota Pemalang	11	11	11	11	11	
10	<b>TRAYEK I</b>	Terminal Induk Kota Pemalang - Jl. Slamet Riyadi - Jl. Jend. Sudirman - Beji - RSI - Pedurungan - Banjaran - Jebed - Banjardawa - Taman (BTN Taman Asri) - Jl. Jend. Sudirman - Alun-alun - Jl. RE Martadinata - Jl. Veteran - Jl. Slamet Riyadi - Terminal Induk Kota Pemalang	14	14	14	14	14	
<b>JUMLAH ANGKUTAN KOTA</b>			93	117	127	129	130	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, 2021

2) Angkutan Perdesaan

a. Kuota Angkutan Perdesaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan Kabupaten Pematang terdapat kuota trayek angkutan pedesaan sebagai berikut :

Tabel 2.8.

Kuota Angkutan Pedesaan

No	Trayek	Kuota
Berpusat di <b>Petarukan</b> :		
1.	Petarukan – Karangasem – Comal PP	11
2.	Klareyan – Petarukan – Pener PP	21
Berpusat di <b>Comal</b> :		
1.	Comal – Tegalsari – Banjardawa PP	18
2.	Comal – Kaliwadas – Cikadu PP	20
3.	Comal – Pesantren – Petarukan PP	25
4.	Comal – Kaliprau – Blendung PP	15
5.	Comal – Pamutih – Blendung PP	10
6.	Comal – Mojo – Blendung PP	15
7.	Comal – Kebojongan PP	06
Berpusat di <b>Randudongkal</b> :		
1.	Randudongkal – Tanahbaya PP	29
2.	Randudongkal – Bantarbolang PP	10
3.	Randudongkal – Watukumpul PP	10
4.	Randudongkal – Warungpring PP	33
5.	Randudongkal – Belik – Cikadu PP	25
6.	Randudongkal – Kecepat – Moga PP	22
Berpusat di <b>Moga</b> :		
1.	Moga – Karangasari – Simpar PP	10
2.	Moga – Pulosari – Belik PP	08
3.	Moga – Mandiraja – Warungpring PP	19
Berpusat di <b>Bantarbolang</b> :		
1.	Bantarbolang – Ps Pagi PP	12
2.	Bantarbolang – Kesesirejo PP	10

b. Jumlah Angkutan Umum Pedesaan

Kondisi jumlah armada / kendaraan angkutan umum pedesaan sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 cenderung meningkat, dari 247 kendaraan pada Tahun 2016, pada Tahun 2020 menjadi 428 kendaraan. Adapun data

kendaraan dari Tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel 2.9.  
Jumlah Armada Angkutan Pedesaan

NO.	TRAYEK YANG DILAYANI	RUTE / LINTASAN	JUMLAH ANGKUTAN					KET.
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	BERPUSAT DI COMAL							
	1	Terminal Comal - Ampelgading - Karangtalok - Kemuning - Tegalsari - Kendalsari - Gondang - Jebed - Pasar Banjardawa PP	3	4	4	4	4	
	2	Terminal Comal - Bodeh - Kebandaran - Babakan - Kesesirejo - Kaliwadas - Jaringarang - Medayu - Cawet - Cikadu PP	9	10	11	11	11	
	3	Terminal Comal - Jatirejo - Panjunan - Kendaldoyong - Pesantren - Sikandang - Temuireng - Petarukan PP	11	11	12	12	13	
	4	Terminal Comal - Sidorejo - Gedek - Gintung - Sarwodadi - Susukan Mojo - Limbangan - Ketapang - Blendung PP.	1	1	1	1	1	
	5	Terminal Comal - Ambokulon - Pegergunung - Pamutih - Blendung PP	7	10	10	10	10	
	6	Terminal Comal - Rowosari - Samong - Tasikrejo - Kaliprau - Blendung PP	5	5	5	5	6	
	7	Terminal Comal - Kauman - Susukan - Klegen - Sidokare - Panjunan - Kebojongan PP	3	4	4	4	4	
	8	Comal - Petarukan - Pemalang - Randudongkal PP	66	86	92	99	102	
	9	Comal - Pemalang - Randudongkal - Moga PP	30	48	54	56	56	
2	BERPUSAT DI PETARUKAN							
	1	Petarukan - Iser - Petanjungan - Karangasem - Widodaren - Comal PP	1	1	1	1	2	

	2	Klareyan - Tegalmati - Petarukan - Serang - Sitemu - Gondang - Pener - Pengadegan - Petarukan - Bulu - Pegundan - Klareyan PP	6	7	7	7	7	
3	BERPUSAT DI BANTARBOLAN G							
	1	Bantarbolang - Glandang - Kuta - Lenggerong - Paduraksa - Bojongbata - Jl. Gatot Subroto - Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo - Jl. Pemuda - Jl. Jendral Sudirman - Pasar Pagi PP	14	14	14	14	14	
	2	Bantarbolang - Karanganyar - Suru - Pedagung - Pasir - Kwasen - Kesesirejo PP	0	0	0	0	0	
	3	Bantarbolang - Karanganyar - Kaliruyung - Semiliran - Kebongede - Klapa Nunggal - Paguyangan - Lenggerong - Silarang - Paduraksa - Bojongbata - Jl. Sulawesi - Jl. Tentara Pelajar - Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo - Jl. Wahid Hasyim - Perhutani - Jl. Jenral Sudirman - BCA - Pasar Pagi Pemalang PP	0	1	2	3	3	
4	BERPUSAT DI RANDUDONGK AL							
	1	Terminal Randudongkal - Lodaya - Kalimas - Kejene - Kalitorong - Mangli - Tanahbaya PP	19	27	34	73	73	
	2	Terminal Randudongkal - Semaya - Wanarata - Bantarbolang PP	1	1	2	3	3	
	3	Terminal Randudongkal - Semingkir - Wisnu - Watukumpul PP	2	2	4	5	5	
	4	Terminal Randudongkal - Lodaya - Rembul - Cibuyur - Warungpring PP	34	41	54	59	62	
	5	Terminal Randudongkal - Sikasur - Bulakan - Belik - Watukumpul - Cikadu PP	13	17	19	21	21	

	6	Terminal Randudongkal - Mejagung - Kecepit - Kebanggan - Moga PP	20	24	24	27	28	
5	BERPUSAT DI MOGA							
	1	Terminal Moga - Sima - Walangsanga - Karangsari - Simpar PP	2	2	2	3	3	
	2	Terminal Moga - Pulosari - Pratin - Belik PP	0	0	0	0	0	
	3	Terminal Moga - Sima - Mandiraja - Gendoang - Pakembaran - Warungpring PP	0	0	0	0	0	
	JUMLAH		247	316	356	418	428	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, 2021

### 3) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

AKDP yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan melintas di wilayah Kabupaten Pemalang meliputi :

Tabel 2.10.

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang Melintas di Wilayah Kabupaten Pemalang

No	Trayek	Kode Trayek
1.	Purwokerto – Pemalang PP	233022701
2.	Pekalongan - Purwokerto PP	233750201
3.	Pekalongan – Moga PP	233752701
4.	Pekalongan – Comal PP	233752702
5.	Tegal – Pemalang PP	233762701
6.	Tegal – Comal PP	233762702
7.	Tegal – Randudongkal PP	233762703
8.	Tegal – Pemalang – Moga PP	233762704

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

#### b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang mengelola terminal penumpang sebanyak 8 unit terminal tipe C terdiri dari : Terminal Randudongkal, Terminal Belik, Terminal Moga, Terminal Angkutan Kota, Terminal Petarukan, Terminal Warungpring, Terminal Grosir Comal dan Terminal Pasar Comal. Disamping itu juga memiliki fasilitas berupa shelter sebanyak 8 buah dan halte sebanyak 15 buah.

Sedangkan di Kabupaten Pemalang juga terdapat terminal tipe A yang di kelola oleh Kementerian Perhubungan dengan data sebagai berikut :

1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Tabel 2.11.

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Terminal Induk Pemalang

No	Jurusan Yang di Layani
1.	Pemalang – Moga
2.	Pemalang – Purwokerto
3.	Pemalang – Tegal
4.	Pemalang – Pekalongan
5.	Pemalang - Semarang
6.	Pemalang – Kudus

Sumber : Terminal Induk Pemalang, 2021

2. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Tabel 2.12.

Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Induk Pemalang

No	Jurusan Yang di Layani
1.	Pemalang – Jakarta
2.	Pemalang – Merak
3.	Pemalang – Bandung
4.	Pemalang – Cirebon
5.	Pemalang – Yogyakarta
6.	Pemalang – Surabaya
7.	Pemalang – Malang
8.	Pemalang – Sumatera
9.	Pemalang – Bali

Sumber : Terminal Induk Pemalang, 2021

Stasiun yang ada di Kabupaten Pemalang ada 3 stasiun yaitu stasiun Pemalang, stasiun Petarukan dan stasiun Comal. Stasiun yang melayani penumpang terpusat pada stasiun Pemalang.

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/648/Tahun 2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Pemalang ruas jalan Kabupaten sebanyak 305 ruas (674,52 Km). Terbagi dalam 14 (empat belas) Kecamatan.

Guna mendukung keselamatan transportasi jalan, Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Pengadaan Marka Jalan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Pemeliharaan shelter dan halte.

Fasilitas perlengkapan jalan yang telah dipasang Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya baik di jalan Kabupaten, jalan Provinsi, maupun jalan Nasional adalah terdiri dari :

- Rambu lalu lintas

Rambu lalu lintas di Kabupaten Pematang Jaya di tunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.13.

Data Rambu Lalu Lintas

No	JENIS RAMBU	Jumlah Kebutuhan	TAHUN				Ketersediaan s/d 2020	Sisa Kebutuhan	
			Sampai dengan 2016	2017	2018	2019			2020
1	Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (buah)	320	146		24		7	177	143
2	Rambu Himbauan (buah)	23	3			10		13	10
3	Rambu Penunjuk Jurusan (buah)	37	21					21	16
4	Papan Nama (buah)	216	122					122	94
5	Rambu Ukuran 45 x 45 (buah)	84	47					47	37
6	Rambu Ukuran 60 x 60 (buah)	2646	1074	296		118		1488	1158
7	Rambu Ukuran 90 x 90 (buah)	11	6					6	5
8	Petunjuk Jalur Alternatif (buah)	85	48					48	37
9	Traffic Light (buah)	30	12	3	1	2	2	20	10
10	Counter Down (buah)	21	12					12	9
11	Warning Light (buah)	60	29	11		5		45	15
12	Marka Jalan (m3)	19068	6739	1301	436	1731	400	10607	8461
13	Halte (buah)	24	13	1	2	3		19	5
14	Deliniator (buah)	120	90					90	30
15	Guardrail (beam)	780	487	3			22	512	268
16	Cermin Tikungan (buah)	45	19	6			2	27	18

17	Rambu elektronik (buah)	8	0	1				1	7
18	Pita Kejut (buah)	11	0	3	3			6	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.589</b>	<b>8.868</b>	<b>1.625</b>	<b>466</b>	<b>1.869</b>	<b>433</b>	<b>13.261</b>	<b>10.328</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, 2021

- marka jalan;
- alat pemberi isyarat lalu lintas;
- alat pengamanan pengguna Jalan, terdiri atas:
  - 1) pagar pengaman;
  - 2) cermin tikungan;
  - 3) tanda patok tikungan (delineator);
  - 4) Pita Penggaduh.

Selain kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, mengingat masih adanya kekurangan atau hal-hal yang harus dilakukan, antara lain :

- Perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap Rencana Induk LLAJ karena dinilai sudah kurang sesuai dengan kondisi sekarang
- Sudah pudar/hilangnya marka jalan dan *zebracross*, terutama yang terdapat di jalan-jalan protokol ibukota kabupaten dan di depan sekolah-sekolah;
- Kurang kesadaran pemilik/atau pengusaha untuk menyediakan lahan parkir serta kurang tertibnya parkir yang ada di badan jalan, di jalan-jalan protokol yang melalui kawasan/pusat perdagangan di ibukota kabupaten;
- Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas untuk jalan-jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang, mengingat kondisi geografis Kabupaten Pemalang bagian Selatan yang berupa dataran tinggi banyak memerlukan rambu lalu lintas sebagai petunjuk dan peringatan bagi para pengguna

jalan demi keamanan dan keselamatan berlalu lintas;

- Hilangnya beberapa rambu lalu lintas yang telah dipasang, karena kurangnya pengertian masyarakat akan arti pentingnya rambu lalu lintas bagi pengguna jalan.
- Masih banyak dibutuhkan pengaman jalan khususnya diwilayah bertebing curam dan tanjakan maupun turunan jalan yang tajam.

d. Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Untuk mengetahui kondisi laik/tidaknya kendaraan angkutan penumpang dan barang yang akan beroperasi di jalan dan sebagai kelengkapan kendaraan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang memberikan pelayanan teknis berupa Pemeriksaan/Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terakreditasi B pada tahun 2018 dan tahun 2020. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 sebanyak 8.930 kendaraan, jumlah kendaraan yang melakukan uji kir sebanyak 4.916 kendaraan yang lulus uji kir sebanyak 4.821 kendaraan. Persentase kendaraan bermotor (angkutan penumpang dan barang) melakukan uji kendaraan menunjukkan perkembangan cenderung menurun yang di sebabkan adanya edaran dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pencegahan penularan Covid-19. Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang melakukan persiapan untuk memenuhi persyaratan tersebut sehingga tidak melakukan pelayanan pengujian selama 2 (dua) bulan dan pada tahun 2020 capaian indikator tersebut sebesar 55,05%, bila di bandingkan dengan tahun 2016 persentase kendaraan yang melakukan uji kir sebanyak 117 % pada tahun 2016 masih banyak kendaraan di luar KBWU yang melakukan uji kir di Kabupaten Pemalang. Hal ini menyebabkan tingginya potensi kecelakaan karena rendahnya kendaraan umum yang memenuhi

aspek/ standar keselamatan, salah satu faktor ini karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kir kendaraan bermotor, data jumlah KBWU dan kendaraan yang melakukan pengujian tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.14.

Persentase KBWU yang di Uji Kir

No	TAHUN	KBWU	KENDARAAN YANG DI UJI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100$
1	2016	5.158	6.017	117
2	2017	7.560	6.027	80
3	2018	7.489	6.085	81
4	2019	8.544	6.079	71
5	2020	8.930	4.916	55

*Ket. Jumlah pengujian 2 x Kendaraan yang di Uji*

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, 2021*

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menunjang pelayanan bidang perhubungan pada umumnya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan handal agar dapat memberikan pelayanan lebih baik. Jumlah SDM bidang perhubungan, terdiri dari :

- 1) Unit Terminal : dari 8 unit terminal yang ada, SDM yang bertugas pada lokasi terminal sebanyak 64 orang terdiri dari 26 orang PNS dan 38 orang non PNS;
- 2) Unit Pengujian Kendaraan bermotor pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor SDM yang ada terdiri dari 8 orang Penguji terdiri dari 5 PNS dan 3 non PNS, 6 orang petugas Administrasi terdiri dari 2 orang PNS dan 4 orang non PNS, dan 3 orang petugas Pendukung Teknis Pengujian terdiri dari 1 orang PNS dan 2 orang non PNS.
- 3) Seksi Manajemen Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin, dan Pengelolaan Parkir terdiri dari : 15 orang yang bertugas dalam bidang MLL dan Evaluasi Andalalin terdiri dari 3 orang PNS dan 12 orang non PNS, dan 11 orang orang yang bertugas pada Pengelolaan

Parkir terdiri dari 4 orang PNS dan 7 orang non PNS.

- 4) Pengawas Kelaikan Jalan. SDM yang bertugas sebagai pengawas kelaikan jalan berjumlah 2 orang dan sudah memiliki kompetensi dalam hal pengawasan kelaikan jalan. Akan tetapi masih sangat diperlukan adanya pelatihan teknis untuk diklat PPNS bidang Perhubungan.

## **2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang 2016-2021 telah disusun indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini hasil capaian kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020.

Capaian kinerja indikator urusan perhubungan di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan yang baik, yaitu persentase perlengkapan jalan (APILL dan rambu) dalam kondisi baik mencapai 85% pada tahun 2020 dimana pada tahun 2016 hanya 77 % atau naik 8 % dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

Berdasarkan Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2017 sebesar 355 sedangkan Tahun 2020 jumlah kecelakaan 461 kasus kecelakaan artinya ada peningkatan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (trend negatif) yang seharusnya setiap Tahun ada penurunan (trend positif) dikarenakan berbagai faktor sebagai berikut :

1. Faktor Human Error merupakan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian manusia seperti mengantuk, lelah, melamun/ tidak fokus;
2. Faktor Jalan dimana kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kondisi jalan yang rusak, jalan berlubang, jalan tikungan dan jalan naik turun
3. Faktor Kendaraan dimana kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kondisi kendaraan tidak baik seperti

- rem kendaraan blong, mesin kendaraan mati, dan rantai kendaraan putus;
4. Faktor Lingkungan dimana kecelakaan lalu lintas karena lingkungan sawah, lingkungan pasar (keramaian);
  5. Faktor Alam, kecelakaan lalu lintas disebabkan karena adanya bencana alam, pohon tumbang, kabut, hujan deras, angin kencang;
  6. Faktor Minimnya Sarana Perlengkapan Jalan seperti rambu-rambu jalan, penerangan jalan, pagar pengaman jalan.

Tabel 2.15  
Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas dan kerugiannya  
pada tahun 2020

NO	BULAN	JUMLAH LAKA	KORBAN			KERUGIAN MATERIIL	KET
			MD	LB	LR		
1	JANUARI	36	5	0	41	Rp 8.000.000	
2	PEBRUARI	41	8	0	50	Rp 14.500.000	
3	MARET	42	8	0	47	Rp 20.600.000	
4	APRIL	25	6	0	21	Rp 5.000.000	
5	MEI	39	8	0	42	Rp 11.400.000	
6	JUNI	40	14	0	51	Rp 25.300.000	
7	JULI	34	11	0	33	Rp 19.700.000	
8	AGUSTUS	36	8	1	41	Rp 37.500.000	
9	SEPTEMBER	53	11	0	50	Rp 26.300.000	
10	OKTOBER	35	9	0	38	Rp 37.900.000	
11	NOVEMBER	41	2	0	51	Rp 22.750.000	
12	DESEMBER	39	10	0	42	Rp 19.600.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>461</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>507</b>	<b>Rp 248.550.000</b>	

Sumber : satlantas Polres Pematang tahun 2020

Sesuai Keputusan Bupati Nomor 188.4/108/Tahun 2021 tentang Penetapan Tipe dan Lokasi Terminal Penumpang di Kabupaten Pematang, Menyebutkan bahwa jumlah terminal penumpang sebanyak 8 terminal penumpang tipe C yaitu terminal Randudongkal, terminal Belik, terminal Moga, terminal Angkutan Kota, terminal Petarukan, terminal Warungpring, terminal Grosir Comal dan terminal Pasar Comal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa penyediaan fasilitas terminal meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Kondisi

fasilitas utama pada terminal tipe C di Kabupaten Pemalang di sampaikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.16.  
Kondisi Infrastruktur Simpul Terminal Penumpang Tipe C

NO	NAMA TERMINAL	TIPE	LOKASI	KONDISI	STATUS ASET
1	Terminal Randudongkal Baru	C	Jl. Raya Randudongkal, Kec. Randudongkal	Layak Oprasi	Pemerintah Kabupaten Pemalang
2	Terminal Belik	C	Jl. Gatot Subroto Desa Belik, Kec. Belik,	Layak Oprasi	Pemerintah Kabupaten Pemalang
3	Terminal Moga	C	Jl. Raya Moga Desa Banyumudal Kec. Moga	Tidak Layak Oprasi	Pemerintah Kabupaten Pemalang
4	Terminal Angkutan Kota	C	Jl. Veteran Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang	Layak Oprasi	Pemerintah Kabupaten Pemalang
5	Terminal Petarukan	C	Jl. Raya Petarukan Kel. Petarukan Kec. Petarukan	Layak Oprasi	Pemerintah Kabupaten Pemalang
6	Terminal Warungpring	C	Jl. Raya Warungpring Desa Warungpring Kec. Warungpring	Tidak Layak Oprasi	Pemerintah Kabupaten Pemalang
7	Terminal Grosir Comal	C	Jl. Raya Sidorejo Kel. Purwoharjo Kec. Comal	Layak Oprasi	Pemerintah Kabupaten Pemalang
8	Terminal Pasar Comal	C	Jl. A. Yani Kel. Purwoharjo Kec. Comal	Layak Oprasi	Pemerintah Kabupaten Pemalang

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, 2021

Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan sebagai berikut :

Tabel 2.17.  
Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan (SPP) Terminal Penumpang Tipe C

No	Fasilitas	Terminal							
		Randudongkal	Belik	Moga	Warungpring	Angkot PML	Grosir Comal	Petarukan	Pasar Comal
1	Jalur Keberangkatan	√	√	√	X	√	√	√	√
2	Jalur Kedatangan	√	√	√	X	√	√	√	√
3	Ruang Tunggu Penumpang / Pengantar dan / atau penjemput	√	√	√	X	√	√	√	√
4	Tempat naik turun penumpang	√	√	X	X	√	√	√	√
5	Tempat Parkir Kendaraan	√	√	√	X	√	√	√	√

6	Fasilitas Pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	X	√	√	√	√
7	Perlengkapan Jalan	√	√	√	X	√	√	√	√
8	Media informasi	√	√	X	X	√	X	X	√
9	Kantor penyelenggara terminal	√	√	√	√	√	√	√	√
10	loket penjualan tiket	√	√	X	X	X	√	X	X

Keterangan :

√ Ada

X Tidak ada

Sumber : Dinas Perhubungan tahun 2021

Tabel 2.18.

Persentase Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan (SPP) Terminal Penumpang Tipe C

NO	TERMINAL	LOKASI	% PEMENUHAN SPP TERMINAL PENUMPANG TIPE C					
			KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA		KONDISI SARANA PRASARANA			
			ADA	TIDAK ADA	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Terminal Randudongkal Baru	Jl. Raya Randudongkal, Kec. Randudongkal	100%	-	10%	18%	44%	28%
2	Terminal Belik	Jl. Gatot Subroto Desa Belik, Kec. Belik	100%	-	36%	11%	23%	30%
3	Terminal Moga	Jl. Raya Moga, Desa Banyumudal, Kec. Moga	-	25%	24%	31%	21%	24%
4	Terminal Angkutan Kota	Jl. Veteran, Kel. Mulyoharjo, Kec. Pemalang Kota	-	50%	41%	16%	20%	24%
5	Terminal Petarukan	Jl. Raya Petarukan, Kel. Petarukan, Kec. Petarukan	-	25%	19%	23%	18%	40%
6	Terminal Warungpring	Jl. Raya Warungpring, Desa Warungpring, Kec. Warungpring	-	10%	39%	36%	10%	15%
7	Terminal Grosir Comal	Jl. Raya Sidorejo, Kel. Purwoharjo, Kec. Comal	-	50%	18%	13%	24%	45%
8	Terminal Pasar Comal	Jl. A. Yani, Kel. Purwoharjo, Kec. Comal	-	50%	34%	12%	20%	34%
Rata - rata Kabupaten Pemalang			25					

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, 2021

Perlu pemenuhan peningkatan fasilitas utama dan peningkatan fasilitas pendukung pada terminal tipe C agar lebih optimal dalam pemanfaatan Terminal tipe C untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat di Kabupaten Pematang.

Indikator tentang persentase angkutan umum yang memiliki ijin trayek menunjukkan Kenaikan dari 58,5 % pada tahun 2016 naik menjadi 97,80% di tahun 2020, Hal ini sesuai dengan data load factor di bawah ini:

Tabel 2.19.  
Load Factor trayek angkutan tahun 2020

Trayek A	50 %	Trayek F	50 %
Trayek B	50 %	Trayek G	24 %
Trayek C	0	Trayek G1	39 %
Trayek D	0	Trayek H	24 %
Trayek E	24 %	Trayek I	47 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Tahun 2021

Berdasarkan hasil kajian evaluasi jaringan trayek angkutan perkotaan yang dilakukan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, untuk data load factor sebesar 50% adalah trayek A, B dan F untuk trayek yang lainnya di bawah 50%. Sedangkan trayek yang melayani angkutan perdesaan belum pernah dilakukan kajian, sehingga data load factornya belum diketahui. terjadi karena adanya pandemi Covid 19 sehingga angkutan umum belum semuanya mengurus perpanjangan ijin trayek.

Persentase zona parkir yang sudah terkelola dengan baik menunjukkan peningkatan dari 74,04% pada tahun 2016 menjadi sebesar 78,73% dari jumlah potensi parkir sebanyak 446 titik parkir yang telah di kelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang sebanyak 351 titik di tahun 2020. Di Kabupaten Pematang terdapat 2 stasiun Kereta Api dengan jumlah perlintasan tidak sebidang 1 titik, perlintasan sebidang sebanyak 48 titik dan 14 titik sudah dilengkapi dengan pos dan palang pintu kereta api. Sedangkan data Data V/C Ratio/Level of Service di ruas jalan kewenangan kabupaten, sebagai berikut :

Tabel 2.20  
V/C ratio di ruas jalan kewenangan kabupaten

No	Nama Jalan	Seksi	Arah	Volume Lalin (V)	Kapasitas Jalan (C)	Derajat Kejenuhan	Level Of Service
----	------------	-------	------	------------------	---------------------	-------------------	------------------

1	JL. Ahmad Yani			885,5 smp/jam	2757,865 smp/jam	0,31	B
2	JL. Dr. Wahidin			973 smp/jam	2104,68 smp/jam	0,4	B
3	JL. Kolonel Sugiono			985,5 smp/jam	3141,442 smp/jam	0,31	B
4	JL. Jendral Sudirman	Seksi 1	Barat	503,15 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,36	B
			Timur	508,65 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,37	B
		Seksi 2	Barat	772,5 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,56	C
			Timur	678,9 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,49	C
		Seksi 3	Barat	710,4 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,51	C
			Timur	617,35 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,45	C

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Perkembangan urusan perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.21.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas	Kasus	NA	NA	355	343	424	461
2.	Rasio Konektivitas	Angka	NA	NA	NA	NA	NA	75,25
3.	% perengkapan jalan (APILL dan rambu) dalam kondisi baik	%	75	77	79	81	83	85
4.	% angkutan umum yang memiliki ijin trayek	%	20,27	58,5	77,24	87,71	94,02	97,84
5.	% Terminal C sesuai standar	%	25	25	25	25	25	25
6.	persentase pengguna moda transportasi umum diperkotaan	%	NA	NA	NA	NA	41	25
7.	% kendaraan bermotor (angkutan penumpang dan barang) melakukan uji kendaraan	%	97,43	117	79,7	81,25	71,149	55,05
8.	% Titik parkir yang sudah dikelola	%	69,73	74,04	74,27	74,93	76,42	78,73
9.	% angkutan barang yang dilayani terminal bongkar muat	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.	% kelengkapan pelabuhan pengumpan sesuai ketentuan	%	NA	NA	NA	NA	NA	5

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021

**Tabel 2.22**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Terminal Bis	8	8	Unit	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
2	Jumlah Terminal Barang	1	1	Unit	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah terminal yang beroperasi	9	9	Unit	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	100	100	88,9	88,9	88,9
4	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	8/8	8/8	Klp	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	100	100	100,0	100,0	100,0
5	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	90	90	%	90	91	92	93	94	75	77	79	81	83	8,33	84,62	85,87	87,10	88,30

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Tersedianya balai pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi taman kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	1	1	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100,0	100,0	100,0
7	Persentase ketersediaan angkutan kota	24,92	24,92	%	24,92	24,92	24,92	24,92	24,92	9	12,1	13,7	14,3	14,8	36,12	48,56	55,0	57,4	59,4
8	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	13,79	13,79	%	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	10,67	14,09	16	17,15	12,34	77,37	102,18	116,0	124,4	89,5
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				

					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang	19,78	19,78	%	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	11,39	14,86	17	18,39	19,17	57,58	75,13	85,95	92,97	96,92
10	Jumlah orang melalui/masuk terminal per tahun	3.128.517	3.128.517	Orang	3.128.517	3.094.536	3.053.759	2.265.400	3.001.655	2.628.517	2.644.536	2.628.759	1.965.400	1.410.784	84,02	85,46	86,08	86,76	47,00
11	Rasio ijin trayek	150	150	Rasio	140	150	150	150	150	352	113	63	38	23	251,43	75,33	42,0	25,3	15,3
12	Jumlah uji kendaraan bermotor wajib uji	11.000	11.000	Kali	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200	12.033	12.033	12.169	11.779	10.062	120,33	116,83	114,80	108,06	89,84
13	Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji	70	70	Rasio	70	73	76	79	82	120	117	115	108	90	171,90	160,03	151,06	136,79	109,56
14	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	50	50	%	36	40	44	49	55	36,2	44,5	46,47	54,4	56,23	100,6	111,3	105,6	111,0	102,2
15	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Kabupaten/Kota.	50	50	%	36	40	44	49	55	36,2	44,5	46,47	54,4	56,23	100,6	111,3	105,6	111,0	102,2

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan**

Berbagai kondisi *Internal* dan *Eksternal* yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya

Proses identifikasi pada hasil analisa SWOT (tabulasi antara Faktor Eksternal: peluang dan ancaman dengan Faktor Internal: kekuatan dan kelemahan) diharapkan strategi yang dikembangkan akan menuju pada pencapaian target Kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya, sebagai berikut:

1. *Strengths* (kekuatan) *Internal*
  - a. Adanya payung hukum yang kuat diantaranya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat, dan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya;
  - b. Koordinasi antar instansi, Pemerintah Pusat dan kabupaten / kota yang baik
  - c. Beroperasinya layanan angkutan umum dan Terdapat simpul transportasi di Kabupaten Pematang Jaya
  - d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur
2. *Weaknesses* (kelemahan) *Internal*
  - a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana prasarana transportasi di Kabupaten Pematang Jaya
  - b. Pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C masih rendah

- c. Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
  - 3. *Oportunities* (peluang) *Eksternal*
    - a. Kemajuan teknologi berbasis Internet
    - b. Pelayanan Uji KIR dengan layanan smart Card dan Pembayaran Non Tunai
    - c. Tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang handal, nyaman, aman dan terjangkau dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi
    - d. Adanya program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang diharapkan bisa menghidupkan kembali layanan dan Pengembangan Angkutan Umum
  - 4. *Threats* (tantangan) *External*
    - a. Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor
    - b. Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi;
    - c. Belum semua penyedia layanan transportasi mengetahui dan memahami pentingnya pengujian kendaraan bermotor dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi;
    - d. Belum Optimalnya terminal Type C sesuai dengan Standar Pelayanan.
- A. Strategi *Strengths* – *Oportunities*
- 1. Koordinasi dan Sinkronisasi program/kegiatan di sektor perhubungan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
  - 2. Mengembangkan angkutan umum untuk meningkatkan aksesibilitas.
- B. Strategi *Strengths* - *Threats*
- 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi pelayanan kepada masyarakat menggunakan teknologi informasi;
  - 2. Melibatkan instansi terkait dalam peningkatan pembinaan dan pemahaman penyedia layanan transportasi untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Kabupaten Pemalang;
  - 3. Menerapkan protokol kesehatan pada angkutan

perkotaan yang beroperasi.

C. Strategi *Weaknesses – Oportunities*

1. Menyediakan dan meningkatkan kinerja sarana prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis wilayah di Kabupaten Pematang Jaya;
2. Meningkatkan jumlah dan kapasitas aparatur serta memenuhi kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

D. Strategi *Weaknesses - Threats*

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana prasarana transportasi di Kabupaten Pematang Jaya;
2. Melengkapi fasilitas sarana prasarana penyelenggaraan terminal tipe C di Kabupaten Pematang Jaya.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang**

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan.

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan pada Bab II, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sistem konektivitas antar wilayah belum optimal	kurangnya pelayanan angkutan umum di kab. Pematang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kurangnya pembinaan thd layanan angkutan umum</li> <li>2. belum adanya pembaharuan jaringan trayek menyeluruh</li> <li>3. Diperlukannya pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum</li> </ol>
		Masih rendahnya efektivitas simpul transportasi di terminal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terpenuhinya sarana prasarana terminal penumpang sesuai dengan standar Pelayanan</li> <li>- Belum terbangunnya terminal bongkar muat</li> <li>- Kurangnya kapasitas SDM pengelola terminal</li> </ul>
		Belum adanya pelabuhan pengumpan lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis perijinan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal</li> </ul>
	Potensi kemacetan di kawasan perkotaan	- Manajemen lalu lintas di perkotaan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan sarana prasarana perlengkapan lalu lintas belum optimal</li> <li>- Manajemen dan SDM pengelola parkir belum optimal</li> <li>- Banyaknya titik-titik rawan kemacetan di perkotaan pada jam tertentu</li> </ul>

			- Adanya potensi gangguan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan baru di Ruas Jalan Kabupaten
	Tingginya potensi kecelakaan lalu lintas	Masih rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) untuk melakukan uji berkala	- tidak adanya sanksi administrasi terhadap keterlambatan pengujian berkala KBWU - kurangnya pemahaman keselamatan transportasi
		Belum terpenuhinya fasilitas Perlengkapan jalan	- Belum terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan - Belum semua perlintasan sebidang terpasang palang pintu

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2021 - 2026 merupakan visi, misi dan program yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Visi dan misi serta program tersebut tertuang dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus dilaksanakan dalam program 5 tahunan Perangkat Daerah (PD) yang dirancang melalui Rencana Strategis (Renstra).

Visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menjadi acuan program kerja 5 tahunan Dinas Perhubungan yang disusun secara sistematis. Adapun visi dan misi, pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2022 adalah:

***“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur Agamis dan Ngangeni”.***

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

#### **Adil**

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarawilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

#### **Makmur**

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

## **Agamis**

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

## **Ngangeni**

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

### **1. Desa Wisata (Dewi)**

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

## 2. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

## 3. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## 4. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pematang Jaya tersebut, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya mendukung misi keenam, yaitu : **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”** yang dicapai melalui tujuan daerah berupa meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Infrastruktur (IKLI). Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan IKLI ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya konektivitas antar wilayah.

Berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pematang Jaya, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya mendukung program Unggulan Desa Wisata (Dewi). Dukungan terhadap Dewi diwujudkan melalui pengadaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan umum.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pematang Jaya dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan

mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
<i>Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeri</i>				
Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan	<p>1.kurangnya pelayanan angkutan umum di kab pemalang</p> <p>2.Masih rendahnya efektivitas simpul transportasi di terminal</p> <p>3.Belum adanya pelabuhan pengumpan lokal</p>	<p>1. kurangnya pembinaan thd layanan angkutan umum</p> <p>2. belum adanya pembaharuan jaringan trayek menyeluruh</p> <p>3. Diperlukannya pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum</p> <p>4. Belum terpenuhinya sarana prasarana terminal penumpang sesuai dengan standar Pelayanan</p> <p>5. Belum terbangunnya terminal bongkar muat</p> <p>6. Kurangnya kapasitas SDM pengelola terminal</p> <p>7. Belum terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis perijinan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal</p>	<p>1. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</p> <p>3. Adanya program pengelolaan Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang</p>

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
		<p>4. Manajemen lalu lintas di perkotaan belum optimal</p> <p>5. Masih rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) untuk melakukan uji berkala</p> <p>6. Belum terpenuhinya fasilitas Perlengkapan jalan</p>	<p>8. Pengelolaan sarana prasarana perlengkapan lalu lintas belum optimal</p> <p>9. Manajemen pengelolaan Parkir dan SDM pengelola parkir belum optimal</p> <p>10. Banyaknya titik-titik rawan kemacetan di perkotaan pada jam tertentu</p> <p>11. Adanya potensi gangguan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan baru di Ruas Jalan Kabupaten</p> <p>12. tidak adanya sanksi administrasi terhadap keterlambatan pengujian berkala KBWU</p> <p>13. kurangnya pemahaman keselamatan transportasi</p> <p>14. Belum terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan</p> <p>15. Belum semua perlintasan sebidang terpasang palang pintu</p>	<p>4. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</p> <p>5. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> <p>6. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p>
Desa Wisata (Dewi)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan	<p>1. Belum terpenuhinya fasilitas Perlengkapan jalan</p> <p>2. kurangnya pelayanan angkutan umum di kab pemalang</p>	<p>1. Belum terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan</p> <p>2. Layanan Angkutan umum tidak sesuai standar</p> <p>3. masyarakat kurang berminat menggunakan angkutan umum</p> <p>4. kurangnya pembinaan thd layanan</p>	<p>1. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>2. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah</p>

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
			angkutan umum 5. belum adanya pembaharuan jaringan trayek menyeluruh	Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan analisa terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2021-2026 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Mendukung program Unggulan Bupati pemalang pada Desa Wisata (DEWI) dan Dukungan kebijakan dari pemerintah untuk pengembangan angkutan masala atau angkutan wisata
2. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor sudah terakreditasi B sehingga bisa melaksanakan pengujian kendaraan bermotor
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pusat
4. Adanya upaya dari Pemda untuk meningkatkan nilai IKLI
5. Masih adanya potensi yang bisa di kembangkan untuk peningkatan pengelolaan parkir; adanya payung hukum (perda no 3 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum) serta adanya rencana digitalisasi pengelolaan parker

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain:

1. Tidak ada regulasi yang mengatur tentang pembatasan kepemilikan kendaraan; Adanya angkutan online baik roda 2 atau 4 dan Rendahnya tingkat finansial pengusaha angkutan untuk peremajaan angkutan umum
2. Masih rendahnya pemahaman keselamatan transportasi di masyarakat dan tidak adanya sanksi administrasi terhadap keterlambatan pengujian berkala
3. Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan sesuai dengan Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

4. Belum terpenuhinya sarana prasarana terminal sesuai dengan standar Pelayanan Minimal (SPM)
5. Manajemen pengelolaan Parkir, SDM pengelola dan juru parkir serta sarana prasarana perlengkapannya belum optimal

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

#### **3.3.1. Telaah Renstra Kementerian**

Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:  
**“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**.

Adapun Misi Kementrian Perhubungan adalah :

1. Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang professional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industry transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi

Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari hasil telaah Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Pemalang adalah:

1. Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk

- mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah; hal ini selaras misi pemerintah daerah yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah Meningkatkan Konektivitas antar wilayah dengan Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat serta Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat
2. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang professional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan; ini sejalan dengan rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang antara lain :
    - a. Meningkatkan sarana prasarana terminal type C,
    - b. Peningkatan pemanfaatan teknologi pada pengujian kendaraan bermotor, pemantauan lalu lintas dan sarana prasarananya,
    - c. Pemenuhan dan Peningkatan SDM yang professional pada Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dalam bidang perhubungan darat.
  3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industry transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif; ini sejalan dengan program Dinas Perhubungan dalam pemenuhan sarana prasarana jalan; peningkatan pengelolaan parkir tepi jalan umum, peningkatan kompetensi SDM pada pengujian kendaraan bermotor, pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dalam bentuk pemilihan Abdi Yasa Teladan.

Adapun permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran K/L beserta faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Telaah Renstra Kementerian Perhubungan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	kurangnya pelayanan angkutan umum di kab pemalang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kurangnya pembinaan thd layanan angkutan umum</li> <li>2. belum adanya pembaharuan jaringan trayek menyeluruh</li> <li>3. Diperlukanny</li> </ol>	Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa

			a pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum	Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya keselamatan transportasi Meningkatkan kualitas SDM transportasi yang kompeten	Belum terpenuhinya fasilitas Perlengkapan jalan	1. Belum terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan 2. Belum semua perlintasan sebidang terpasang palang pintu	Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Manajemen lalu lintas di perkotaan belum optimal	1. Pengelolaan sarana prasarana perlengkapan lalu lintas belum optimal 2. Manajemen dan SDM pengelola parkir belum optimal	Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

### 3.3.2. Telaah Renstra Provinsi

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah pada misi ke tiga yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan gubernur No. 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdapat program kerja Kepala Daerah yang difokuskan pada sektor transportasi yaitu pada program kerja Ke-7 “Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta Pembangunan Embung/Irigasi”.

Hal ini selaras dengan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang yaitu Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran Renstra Provinsi beserta faktor penghambat atau pendorong keberhasilan penanganannya sebagai berikut:

Tabel 3.4

Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	1. kurangnya pelayanan angkutan umum di kab pemalang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kurangnya pembinaan thd layanan angkutan umum</li> <li>2. belum adanya pembaharuan jaringan trayek menyeluruh</li> <li>3. Diperlukannya pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum</li> </ol>	1. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu)

		<p>2. Masih rendahnya efektivitas simpul transportasi di terminal</p> <p>3. Belum adanya pelabuhan pengumpan lokal</p>	<p>4. Belum terpenuhinya sarana prasarana terminal penumpang sesuai dengan standar Pelayanan</p> <p>5. Belum terbangunnya terminal bongkar muat</p> <p>6. Kurangnya kapasitas SDM pengelola terminal</p> <p>7. Belum terpenuhinya administrasi pelabuhan pengumpan lokal</p>	<p>Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</p> <p>3. Adanya program pengelolaan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang</p>
2	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Belum terpenuhinya fasilitas Perlengkapan jalan	<p>1. Belum terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan</p> <p>2. Belum semua perlintasan sebidang terpasang palang pintu</p>	Adanya program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terutama pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

#### 1.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan Kabupaten Pemalang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Pemalang. Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Adapun kebijakan yang diambil, meliputi :

- (1) pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah;
- (2) pengembangan prasarana daerah;
- (3) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
- (4) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (5) pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi

pusat pemasaran hasil komoditas daerah; (6) pengembangan industri; (7) pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; (8) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan (9) pengembangan kawasan strategis daerah.

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tidak memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

#### **1.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disertai juga dengan penyusunan KLHS-RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Perangkat Daerah, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tidak memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, telaah visi misi

dan program prioritas Bupati, dan telaah Renstra Kementerian Perhubungan, dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, yaitu :

- a. Konektifitas
  - 1) Belum optimalnya pelayanan inter/antarmoda transportasi yang menghubungkan antar terminal tipe C dan stasiun kereta api serta obyek-obyek wisata
  - 2) Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis
- b. Simpul
  - 1) Belum optimalnya penyelenggaraan terminal tipe C;
  - 2) Belum terselesaikannya pembangunan terminal angkutan barang;
  - 3) Belum optimalnya pemanfaatan terminal agro bisnis
- c. Ruang Pergerakan
  - 1) Belum optimalnya pelaksanaan manajemen lalu lintas
  - 2) Tingginya volume kendaraan (LHR) di jalan perkotaan yang mengakibatkan kemacetan
  - 3) Belum optimalnya pengelolaan parkir
- d. Keselamatan
  - 1) Tingginya pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan umum atau pribadi menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan raya dan perlintasan KA
  - 2) Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan jalan
  - 3) Belum semua kendaraan bermotor wajib uji melakukan pengujian secara berkala

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### a. Tujuan

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah “Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah”, dengan indikator Rasio Konektivitas di Kabupaten Pemalang, diharapkan pada akhir tahun 2026 mencapai 76,75 %

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah misi ke-6 **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”** pada tujuan ke-2 “meningkatkan konektivitas antar wilayah “

##### b. Sasaran

Untuk mendukung pencapaian tujuan dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terdapat beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Angkutan dan indikator sasaran Prosentase pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Pemalang, diharapkan pada akhir tahun 2026 mencapai 64,86%
2. Meningkatnya Sarana prasarana perhubungan dan indikator sasaran level of service, diharapkan pada akhir tahun 2026 mencapai 0,42%.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran dalam mencapai pembangunan bidang Perhubungan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat melalui tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas**  
**Perhubungan**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya tatakelola organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang		Nilai Reformasi Birokrasi	56,58	57	57,4	57,8	58,1	58,5
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang	Nilai Sakip	55,5	55,6	55,7	55,8	55,9	56
2	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah		Rasio Konektivitas	75,5	75,75	76	76,25	76,5	76,75
		Meningkatnya Pelayanan Angkutan	Persentase Pelayanan Angkutan Jalan	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5
		Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Level Of Service	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Misi dan program kerja tersebut maka dirumuskan strategi 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan adalah dengan:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan
3. Mengembangkan Jaringan layanan Lalu Lintas

#### **5.2. Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Siantar.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi wilayah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Kebijakan tersebut disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Siantar 2021-2026 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi *Konektifitas, Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi*. Adapun arah kebijakan dimaksud adalah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas

Perhubungan Kabupaten Pemalang dalam lima tahun mendatang yang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas**  
**Perhubungan Kabupaten Pemalang**

<b>VISI</b> : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni			
<b>MISI 6</b> : Mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Angkutan	1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Angkutan Jalan serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan angkutan umum untuk meningkatkan aksesibilitas</li> <li>2. Melibatkan instansi terkait dalam peningkatan pembinaan dan pemahaman penyedia layanan transportasi untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Kabupaten Pemalang;</li> <li>3. Menerapkan protokol kesehatan pada angkutan aglomerasi perkotaan yang beroperasi.</li> <li>4. Melengkapi fasilitas sarana prasarana penyelenggaraan terminal tipe C di Kabupaten Pemalang</li> </ol>
	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Koordinasi Sinkronisasi program/kegiatan di sektor perhubungan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;</li> <li>2.2 Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pelayanan kepada masyarakat menggunakan teknologi informasi;</li> <li>2.3 Menyediakan, meningkatkan dan mempertahankan kinerja sarana prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis wilayah di Kabupaten Pemalang</li> <li>2.4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi di Kabupaten Pemalang;</li> </ol>

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM,**  
**KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi ~~Keuangan SKPD~~
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - f. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - c. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
  - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan
  - c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tidak Terwujud
  - f. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - g. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
  - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- h. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten
    - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
    - b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
    - c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
  2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
    - a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
    - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
    - c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
    - d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
  3. Pengelolaan Terminal Tipe C;
    - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
    - b. Pembangunan Gedung Terminal
    - c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
    - d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
    - e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
  4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
    - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
    - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
  5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
    - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    - c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
    - d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    - e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    - f. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
    - g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- h. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - i. Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - j. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kab.;
    - a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
    - b. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
    - c. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
    - d. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
    - e. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
  7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
    - a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
    - b. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
    - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
    - d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
  8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
    - a. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
    - b. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
    - c. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
    - d. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
    - e. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
  9. Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
    - a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
  10. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
- 11. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang
    - a. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- C. Program Pengelolaan Pelayaran
- 1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
    - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya selama tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp .	Target	(Rp)	Target	(Rp)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah				Rasio Konektivitas	%	0	75,5	19.397.606.000	75,75	29.491.685.590	76	21.988.150.490	76,3	21.288.032.490	76,5	20.164.036.990	76,75	21.111.245.990	76,75	21.105.965.990		
	Meningkatnya pelayanan kinerja Dinas Perhubungan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Dinas Perhubungan	Indeks	76,94	77,54	11.031.050.590	78,04	13.550.426.490	78,64	11.945.585.490	79,1	11.962.249.490	79,74	11.977.691.490	80,24	12.143.115.490	80,24	12.137.835.490		
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.031.050.590		13.550.426.490		11.945.585.490		11.962.249.490		11.977.691.490		12.143.115.490		12.137.835.490		
				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	56,58	56,58	2.183.474.300	57	4.570.326.000	57,4	2.961.017.000	57,8	2.972.243.000	58,1	2.982.650.000	58,5	3.144.950.000	58,5	3.139.670.000		
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	53,67	55,5	8.847.576.290	55,6	8.980.100.490	55,7	8.984.568.490	55,8	8.990.006.490	55,9	8.995.041.490	56	8.998.165.490	56	8.998.165.490		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp .	Target	(Rp)	Target	(Rp)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan akuntabel	%		100	175.020.690	100	244.275.490	100	246.633.490	100	249.037.490	100	251.488.490	100	253.987.490	100	253.987.490		
		2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen		6	126.375.490	3	126.375.490	3	126.375.490	3	126.375.490	3	126.375.490	3	126.375.490	3	126.375.490	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dokumen				1	5.350.000	1	5.457.000	1	5.566.000	1	5.677.000	1	5.790.000	1	5.790.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	dokumen				1	5.350.000	1	5.457.000	1	5.566.000	1	5.677.000	1	5.790.000	1	5.790.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	dokumen				1	5.350.000	1	5.457.000	1	5.566.000	1	5.677.000	1	5.790.000	1	5.790.000	Dishub	Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp .	Target	(Rp)	Target	(Rp )										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23 )
		2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	dokumen				1	5.350.000	1	5.457.000	1	5.566.000	1	5.677.000	1	5.790.000	1	5.790.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dokumen		2	48.645.200	2	15.000.000	2	15.300.000	2	15.606.000	2	15.918.000	2	16.236.000	2	16.236.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen				3	81.500.000	3	83.130.000	3	84.792.000	3	86.487.000	3	88.216.000	3	88.216.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prersentase administrasi keuangan daerah terpenuhi dalam satu tahun			100	8.672.555.600	100	8.735.825.000	100	8.737.935.000	100	8.740.969.000	100	8.743.553.000	100	8.744.178.000	100	8.744.178.000	100	
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	orang/bulan		72 org /14 bln	8.667.876.000	78 org /14 bln	8.667.876.000	78 org /14 bln	8.667.876.000	78 org /14 bln	8.667.876.000	80 org /14 bln	8.667.876.000	82 org /14 bln	8.667.876.000	82 org /14 bln	8.667.876.000	Dishub	Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp .	Target	(Rp)	Target	(Rp )										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23 )
		2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	dokumen		0	-	1000	24.000.000	1100	25.560.000	1200	27.094.000	1200	28.178.000	1200	29.803.000	1200	29.803.000	Dishub	Pemalang
		2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang tersusun	dokumen	1	1	2.015.800	1	7.849.000	1	8.399.000	1	8.899.000	1	9.399.000	1	9.399.000	1	9.399.000	Dishub	Pemalang
		2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang tersusun	dokumen		0	-	1	21.100.000	1	21.100.000	1	22.100.000	1	23.100.000	1	22.100.000	1	22.100.000	Dishub	Pemalang
		2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	dokumen	11	12	2.663.800	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	Dishub	Pemalang
		2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	dokumen		0		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	Dishub	Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah	%		0	-	100	25.249.000	100	25.605.000	100	26.205.000	100	26.805.000	100	27.405.000	100	27.405.000		
		2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	dokumen		0		1	3.000.000	1	3.105.000	1	3.305.000	1	3.505.000	1	3.705.000	1	3.705.000	Dishub	Pemalang
		2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD yang tersusun	dokumen		0	-	2	5.500.000	2	5.700.000	2	5.900.000	2	6.100.000	2	6.300.000	2	6.300.000	Dishub	Pemalang
		2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang tersusun	dokumen		0	-	12	16.749.000	12	16.800.000	12	17.000.000	12	17.200.000	12	17.400.000	12	17.400.000	Dishub	Pemalang
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah dalam satu tahun	%		100	84.879.600	100	695.029.000	100	251.535.000	100	436.535.000	100	269.535.000	100	464.535.000	100	464.535.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp .	Target	(Rp)	Target	(Rp )										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23 )
		2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelinganya	Jumlah pakaian dinas terpenuhi	Stel		15	30.344.600	227	458.994.000			81	180.000.000			81	180.000.000	81	180.000.000		
		2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dalam satu tahun (jenis)			4	54.535.000	4	54.535.000	4	54.535.000	4	54.535.000	4	54.535.000	4	54.535.000	4	54.535.000	Dishub	Pemalang
		2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	org/kgt				80	150.000.000	82	155.000.000	82	160.000.000	82	165.000.000	84	180.000.000	84	180.000.000	Dishub	Pemalang
		2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	org/kgt				5	31.500.000	5	42.000.000	5	42.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Dishub	Pemalang
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100	437.709.500	100	698.394.000	100	670.023.000	100	704.649.000	100	730.456.000	100	732.156.000	100	732.156.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp .	Target	(Rp)	Target	(Rp )										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23 )
		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	jenis/bulan		4/12	12.375.000	4/12	78.500.000	4/12	10.000.000	4/12	11.000.000	4/12	12.100.000	4/12	12.100.000	4/12	12.100.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit		3	10.000.500	3	35.300.000	3	20.000.000	3	23.000.000	3	26.450.000	3	26.450.000	3	26.450.000	Dishub	Pemalang
		2.13..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	unit		4	-	4	12.450.000	4	10.000.000	4	11.000.000	4	12.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis/bulan		3	82.225.000	3	79.860.000	3	110.000.000	3	121.000.000	3	121.700.000	3	122.400.000	3	122.400.000	Dishub	Pemalang
		2.13..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	jenis/bulan		3	109.703.000	3	120.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	Dishub	Pemalang
		2.13..01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	jenis/bulan		1 / 12	5.340.000	1 / 12	5.500.000	1 / 12	5.500.000	1 / 12	5.500.000	1 / 12	5.500.000	1 / 12	5.500.000	1 / 12	5.500.000	Dishub	Pemalang
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja	Lokasi

(1)	(2)	(3)	Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														perangkat daerah penanggung jawab	(23)
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		2.13..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	kgtn		120	218.066.000	120	354.784.000	120	372.523.000	120	391.149.000	120	410.706.000	120	410.706.000	120	410.706.000	Dishub	Pemalang
		2.13..01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata	jenis		2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan barang milik daerah dalam satu tahun	%		100	414.039.600	100	1.294.594.000	100	509.594.000	100	359.594.000	100	349.594.000	100	349.594.000	100	349.594.000		
		2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit																Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional tersedia	unit		3	93.385.600	1	665.000.000	5	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	unit		25	26.060.000	2	30.000.000			10	40.000.000		30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	Dishub	Pemalang
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja	Lokasi

(1)	(2)	(3)	Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														perangkat daerah penanggung jawab	(23)
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)										
		2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit		5	269.594.000	7	319.594.000	5	269.594.000	5	269.594.000	5	269.594.000	5	269.594.000	5	269.594.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap tersedia (unit)			8	25.000.000	4	40.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
		2.13.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud di adakan					1	200.000.000												
		2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan tersedia					2	40.000.000												
		2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor di adakan							2	30.000.000										
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100	234.100.000	100	713.000.000	100	730.200.000	100	736.200.000	100	742.200.000	100	752.200.000	100	746.920.000		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja	Lokasi

(1)	(2)	(3)	Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														perangkat daerah penanggung jawab	(23)
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim	surat		1000	24.900.000	1000	31.800.000	1000	31.800.000	1000	31.800.000	1000	31.800.000	1000	31.800.000	1000	31.800.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	jns/bln		3/12	202.800.000	3/12	210.800.000	3/12	228.000.000	3/12	234.000.000	3/12	240.000.000	3/12	250.000.000	3/12	244.720.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	jns/bln		1/12	6.400.000	1/12	6.400.000	1/12	6.400.000	1/12	6.400.000	1/12	6.400.000	1/12	6.400.000	1/12	6.400.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	org/bln		51/12	-	51/12	464.000.000	51/12	464.000.000	51/12	464.000.000	51/12	464.000.000	51/12	464.000.000	51/12	464.000.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah dalam satu tahun	%		100	1.012.745.600	100	1.144.060.000	100	774.060.000	100	709.060.000	100	864.060.000	100	819.060.000	100	819.060.000		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja	Lokasi

(1)	(2)	(3)	Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														perangkat daerah penanggung jawab	(23)
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)										
		2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya			13		13	160.000.000	13	160.000.000	13	160.000.000	13	160.000.000	13	160.000.000	13	160.000.000		
		2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara			58	175.160.000	45	164.000.000	45	164.000.000	45	164.000.000	45	164.000.000	45	164.000.000	45	164.000.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit		6	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit		5	6.000.000	35	73.550.000	35	73.550.000	35	73.550.000	35	73.550.000	35	73.550.000	35	73.550.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap tersedia (unit)	unit		30	35.000.000														
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kode</b>	<b>Program, Kegiatan,</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan</b>														<b>Unit kerja</b>	<b>Lokasi</b>

(1)	(2)	(3)	Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														perangkat daerah penanggung jawab	(23)
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)										
		2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit		2	270.000.000	5	650.000.000	2	270.000.000	2	200.000.000	3	350.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit		51	460.075.600	2	30.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	Dishub	Pemalang
		2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit		17	51.510.000	17	51.510.000	17	51.510.000	17	51.510.000	17	51.510.000	17	51.510.000	17	51.510.000	Dishub	Pemalang
	Meningkatnya Pelayanan Angkutan			Prosentase pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Pemalang	Persen	0	0,25	4.245.031.110	0,5	8.215.745.100	0,75	4.501.719.000	1	3.308.030.000	1,25	2.526.302.000	1,5	2.529.372.000	1,5	2.529.372.000		
	Meningkatnya Sarana prasarana perhubungan			level of service	Indeks		0,44	4.121.524.300	0,44	7.725.514.000	0,43	5.540.846.000	0,43	6.017.753.000	0,42	5.660.043.500	0,42	6.438.758.500	0,42	6.438.758.500		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja	Lokasi

(1)	(2)	(3)	Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														perangkat daerah penanggung jawab	(23)
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)										
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kendaraan yang lulus uji kir	%		80	1.918.962.000	80	1.845.000.000	81	915.000.000	81	920.000.000	82	955.000.000	82	898.000.000	82	898.000.000		
				Persentase Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran sesuai standar			37,5	1.819.826.800	47,22	5.574.045.000	50,63	2.726.117.000	60,2	1.467.428.000	63,54	605.700.000	73,08	647.770.000	73,08	647.770.000		
				Persentase awak angkutan yang meningkat kompetesinya			35	177.281.810	40	308.265.100	45	325.602.000	50	340.602.000	55	345.602.000	60	350.602.000	60	350.602.000		
				Persentase kendaraan umum yang laik jalan dan tertib administrasi			70	328.960.500	75	488.435.000	80	535.000.000	85	580.000.000	90	620.000.000	90	633.000.000	90	633.000.000		
				Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik			76,85	3.881.524.300	77,78	7.225.514.000	80,54	5.540.846.000	83	6.017.753.000	85,33	5.660.043.500	85,72	6.438.758.500	85,72	6.438.758.500		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja	Lokasi

(1)	(2)	(3)	Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														perangkat daerah penanggung jawab	(23)
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Prosentase wilayah yang telah di tetapkan rencana induk LLAJ			20	230.954.200	40	348.556.000	60	166.788.000	80	166.788.000	100	166.788.000	166.788.000	166.788.000				
				Persentase titik pengawasan LLAJ				-	100	225.000.000	100	112.500.000	100	112.500.000	100	112.500.000	100	112.500.000	100	112.500.000		
		2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ tersusun	dokumen		1	199.166.200	1	285.000.000	1	135.000.000	1	135.000.000	1	135.000.000	0	135.000.000	0	135.000.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Perbup Rencana Induk Jaringan LLAJ yang di tetapkan	dokumen		1	31.788.000	2	63.556.000	1	31.788.000	1	31.788.000	1	31.788.000	1	31.788.000	1	31.788.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah titik pengendalian dan pengawasan LLAJ	Titik				20	225.000.000	20	112.500.000	20	112.500.000	20	112.500.000	20	112.500.000	20	112.500.000	Dishub	Pemalang
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja	Lokasi

(1)	(2)	(3)	Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														perangkat daerah penanggung jawab	(23)
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)										
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota tersedia			60	2.607.930.600	63	4.567.458.000	71	3.107.458.000	74	3.472.215.000	78	3.022.215.500	81	3.692.215.500	81	3.692.215.500		
		2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan terbangun	unit	3	3	1.790.826.000	3	1.990.826.000	3	1.040.826.000	3	1.790.826.000	3	1.790.826.000	3	1.790.826.000	3	1.790.826.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan terbangun	unit	0	6	535.715.100	24	2.070.000.000	73	1.560.000.000	66	1.200.000.000	61	750.000.000	10	1.420.000.000	10	1.420.000.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan terpelihara	unit		29	94.757.500	32	220.000.000	35	220.000.000	38	194.757.000	41	194.757.500	44	194.757.500	44	194.757.500	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan terpelihara	unit	4	2016	186.632.000	2040	286.632.000	2113	286.632.000	2179	286.632.000	2240	286.632.000	2250	286.632.000	2250	286.632.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal penumpang tipe C yang sesuai standar			25	1.766.409.800	37,5	5.258.495.000	37,5	2.426.637.000	50	1.208.000.000	50	335.300.000	62,5	365.330.000	62,5	365.330.000		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja	Lokasi

(1)	(2)	(3)	Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														perangkat daerah penanggung jawab	(23)		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)										
		2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah kajian rencana pembangunan terminal type C	dokumen				1	150.000.000												Dishub	Pemalang	
		2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah gedung terminal yang dibangun	unit		0	900.000.000	0	3.124.954.000	1	1.500.000.000	0	900.000.000	0		0		0		0		Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan prasarana Terminal Terbangun	Unit		0	-	3	300.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal terpelihara	unit		8	866.409.800	8	1.648.541.000	8	741.637.000	8	123.000.000	8	150.300.000	8	180.330.000	8	180.330.000	8	180.330.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	orang		0		10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	Dishub	Pemalang
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja	Lokasi		

(1)	(2)	(3)	Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														perangkat daerah penanggung jawab	(23)
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir			50	53.417.000	56,94	315.550.000	63,75	299.480.000,00	70,45	259.428.000,00	77,08	270.400.000,00	83,65	282.440.000,00	83,65	282.440.000,00		
		2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitas parkir terbangun	Unit		0		5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.04.02	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah titik parkir yang dilakukan pengawasan	Titik		350	53.417.000	400	165.550.000	450	149.480.000	500	109.428.000	550	120.400.000	600	132.440.000	600	132.440.000	Dishub	Pemalang
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja	Lokasi

(1)	(2)	(3)	Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														perangkat daerah penanggung jawab	(23)
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan diuji			65	1.918.962.000	65	1.845.000.000	67	915.000.000,00	67	920.000.000,00	70	955.000.000,00	70	898.000.000,00	70	898.000.000,00		
		2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian tersedia	Unit	4	1	1.625.134.500	1	1.240.000.000	1	265.000.000	1	290.000.000	1	305.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah SDM pengujian yang mengikuti Diklat	Orang	1	0		4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor			14															Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji di adakan	Unit	0	4.000	117.474.000	6.000	180.000.000	6.500	195.000.000	6.500	195.000.000	7.000	210.000.000	7.100	213.000.000	7.100	213.000.000	Dishub	Pemalang
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja	Lokasi

(1)	(2)	(3)	Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														perangkat daerah penanggung jawab	(23)
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)										
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)								
		2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peserta sosialisasi SOP Pengujian Kendaraan bermotor	Orang		0		200	130.000.000	200	130.000.000	200	130.000.000	200	130.000.000	200	130.000.000	200	130.000.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji																			
		2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian terpelihara	Unit		11	156.353.500	11	190.000.000	11	190.000.000	11	190.000.000	11	190.000.000	11	190.000.000	11	190.000.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah koordinasi pengujian kendaraan bermotor					24	30.000.000	24	30.000.000	24	30.000.000	24	30.000.000	24	30.000.000	24	30.000.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah perda retribusi pengujian kendaraan bermotor di terbitkan	Dokumen		0		0		0	25.000.000	0		0		0		0		Dishub	Pemalang
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja	Lokasi

(1)	(2)	(3)	Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														perangkat daerah penanggung jawab	(23)
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah			
							Target	Rp .	Target	(Rp)	Target	(Rp)										
		2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen kajian SKM	Dokumen		1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase masyarakat yang menerima pengetahuan tentang lalu lintas	%		0,32	1.042.639.500	0,32	2.034.500.000	0,32	2.149.100.000	0,32	2.251.250.000	0,31	2.353.540.000	0,31	2.462.255.000	0,31	2.462.255.000		
		2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota					36.788.500													Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemsangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manemn dan Rekayasa Lalu Lintas																		Dishub	Pemalang
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja	Lokasi

(1)	(2)	(3)	Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														perangkat daerah penanggung jawab	(23)
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)										
		2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rakayasa lalu lintas	Orang		800	69.088.000	800	135.000.000	800	181.500.000	800	209.000.000	800	264.500.000	800	307.000.000	800	307.000.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah titik pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/ kota	Titik		15	936.763.000	16	1.855.000.000	17	1.908.000.000	18	1.966.000.000	19	1.998.000.000	20	2.045.000.000	20	2.045.000.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta forum lalu lintas	Orang		200		250	44.500.000	300	59.600.000	350	76.250.000	400	91.040.000	450	110.255.000	450	110.255.000	Dishub	Pemalang
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	persentase pembangunan pusat kegiatan yang sudah mempunyai dokumen andalalin					80	50.000.000	80	5.000.000,00	80	15.000.000,00	80	5.000.000,00	80	5.000.000,00	80	5.000.000,00		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat	Lokasi

(1)	(2)	(3)	(4)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	n 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		daerah penanggung jawab	(23)
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Perbup Andalalin	Dokumen		0		1	35.000.000	0		0		0		0		0			
		2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	Orang		0		1	10.000.000	0		1	10.000.000	0		0		0			
		2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah pengawasan Dokumen Andalalin disuatu pusat kegiatan	Titik		0		10	5.000.000	15	5.000.000	20	5.000.000	25	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000		
		2.15.02.2.08	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	Persentase awak angkutan yang mengikuti pemilihan awak angkutan teladan			20	177.281.810	20	308.265.100	20	325.602.000,00	20	340.602.000,00	20	345.602.000,00	20	350.602.000,00	20	350.602.000,00		
		2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diramcek (Uji Petik)	Kendaraan				50	70.000.000	50	70.000.000	50	70.000.000	50	70.000.000	50	70.000.000	50	70.000.000		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kode</b>	<b>Program, Kegiatan, Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kondisi Awal Tahu</b>	<b>Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan</b>														<b>Unit kerja perangkat</b>	<b>Lokasi</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	(6)	n 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		daerah penanggung jawab	(23)
							Target	Rp.	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
		2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah posko mudik			2	146.679.810	2	197.663.100	2	215.000.000	2	230.000.000	2	235.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000		
		2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta pemilihan awak angkutan teladan	Orang		40	30.602.000	40	30.602.000	40	30.602.000	40	30.602.000	40	30.602.000	40	30.602.000	40	30.602.000		
		2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang di inspeksi/ audit	Perusahaan				9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan,	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penang	Lokasi
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi kinerja pada akhir periode									

(1)	(2)	(3)	(4)	Sub Kegiatan	(6)	(7)	Target		Target		Target		Target		Target		Renstra Perangkat Daerah		gung jawab	(23)		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			(20)	(21)
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase awak angkutan yang mengikuti pemilihan awak angkutan teladan			12,08	125.689.000	12,92	155.000.000	13,72	175.000.000,00	14,5	195.000.000,00	15,21	215.000.000,00	15,91	215.000.000,00	15,91	215.000.000,00		
		2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							2021	2022	2023	2024	2025	2026							Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target	Rp .	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp )	(22)	(23 )
		2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah kendaraan yang dioprasi	Kendaraan		1.100	125.689.000	1.200	155.000.000	1.300	175.000.000	1.400	195.000.000	1.500	215.000.000	1.600	215.000.000	1.600	215.000.000		
		2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerbitan Izin Trayek Angkutan Perkotaan dan Pedesaan			58,02	109.915.000	77,66	152.985.000	89,01	175.000.000,00	95,9	195.000.000,00	100	210.000.000,00	58,82	220.000.000,00	58,82	220.000.000,00		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp .	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemnhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek / Kartu Pengawasan yang di perbaharui	Kendar aan		322	62.415.000	109	89.985.000	63	100.000.000	38	110.000.000	23	120.000.000	300	125.000.000	300	125.000.000				
		2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Rakor di Bidang Angkutan/P erhubungan (kali)	Kali		30	47.500.000	30	63.000.000	30	75.000.000	30	85.000.000	30	90.000.000	30	95.000.000	30	95.000.000				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp .	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase ketersediaan Dokumen Evaluasi Jaringan Trayek			39,13	93.356.500	60,87	180.450.000	86,96	185.000.000,00	100	190.000.000,00	0	195.000.000,00	30,3	198.000.000,00	30,3	198.000.000,00		
		2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp .	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

		2.15.02.2.14.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen evaluasi jaringan trayek tersusun	Dokumen		1	93.356.500	1	180.450.000	1	185.000.000	1	190.000.000	0	195.000.000	1	198.000.000	1	198.000.000		
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase persyaratan pembangunan pelabuhan yang terpenuhi	%		80	240.000.000	100	500.000.000												
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	jumlah persyaratan pembangunan pelabuhan yang di penuhi	Dokumen		1	240.000.000	1	500.000.000												
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp .	Target	(Rp)	Target	(Rp)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)



Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, yaitu pada kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, khususnya dalam pelaksanaan sub kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, dimana harus ada keterwakilan perempuan pada peserta sosialisasi.

Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Presentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jalan kabupaten / kota	%	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33

Tabel 6.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C	%	25	37,5	37,5	50	50	62,5
2	Terlaksananya uji berkala	Kali pengujian	5.921	6.039	6.349	6.476	6.902	7.040
3	Penetapan tariff angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	%	39,13	60,87	86,96	100	0	30,30
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	%	20	40	60	80	100	

Dalam rangka pengembangan SDM untuk mendukung kelancaran pelayanan kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang telah menyusun Rencana Aksi Daerah Sumber Daya Manusia (RAD SDM) sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 6.4**  
**RAD SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026**

No	Judul/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	TAHUN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				Volume	Anggaran (Rp)												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	150.000.000	100	150.000.000			100	150.000.000			100	150.000.000		
1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Kepegawaian perangkat daerah	%	100	150.000.000	100	150.000.000			100	150.000.000			100	150.000.000		
1.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai	Orang	80	150.000.000	80	150.000.000			80	150.000.000			80	150.000.000		DISHUB
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase penyelenggaraan lalu lintas	%	100	220.000.000	100	220.000.000	100	396.500.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000		
1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase pengelolaan terminal penumpang tipe C	%	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000		
1.1	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	Orang	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Judul/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	TAHUN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Volume	Anggaran (Rp)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor (%)	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	180.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
2.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah SDM pengujian yang mengikuti Diklat	Orang	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2.2	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peserta sosialisasi SOP Pengujian Kendaraan bermotor	Orang					200	130.000.000							DISHUB
3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan manajemen dan rekyasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	%	100	135.000.000	100	135.000.000	100	181.500.000	100	209.000.000	100	264.500.000	100	307.000.000	
3.1	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rakayasa lalu lintas	Orang	840	135.000.000	840	135.000.000	840	181.500.000	840	209.000.000	840	264.500.000	840	307.000.000	DISHUB

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang dalam lima tahun mendatang. Sebagai komitmen untuk mendukung untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021.

Indikator tersebut ditampilkan dalam table 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1

## Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Tujuan dan Sasaran OPD	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2021
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rasio Konektivitas	Rasio	NA	86,6	86,85	87,1	87,35	87,60	87,85	87,85
2.	Persentase Pelayanan Angkutan jalan	%	NA	10,81	21,62	32,43	43,24	54,05	64,86	64,86
3.	Level of service	Rasio	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42

Tabel. 7.2  
Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang

No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah</b>	<b>Rasio Konektivitas</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>75,5</b>	<b>75,75</b>	<b>76</b>	<b>76,3</b>	<b>76,5</b>	<b>76,75</b>	<b>76,75</b>	<b>Ka. Dinas</b>
	<b>Meningkatnya pelayanan kinerja Dinas Perhubungan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Dinas Perhubungan</b>	<b>Indeks</b>	<b>76,94</b>	<b>77,54</b>	<b>78,04</b>	<b>78,64</b>	<b>79,1</b>	<b>79,74</b>	<b>80,24</b>	<b>80,24</b>	<b>Ka. Dinas</b>
2.13.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>56,58</b>	<b>56,58</b>	<b>57</b>	<b>57,4</b>	<b>57,8</b>	<b>58,1</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>Sekretaris</b>
		<b>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>	<b>Nilai</b>	<b>53,67</b>	<b>55,5</b>	<b>55,6</b>	<b>55,7</b>	<b>55,8</b>	<b>55,9</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>Sekretaris</b>
2.13.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan akuntabel</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Sekretaris</b>
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen		6	3	3	3	3	3	15	Kasubbag Binprokeu
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dokumen			1	1	1	1	1	5	Kasubbag Binprokeu
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	dokumen			1	1	1	1	1	5	Kasubbag Binprokeu
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	dokumen			1	1	1	1	1	5	Kasubbag Binprokeu
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	dokumen			1	1	1	1	1	5	Kasubbag Binprokeu

No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dokumen		2	2	2	2	2	2	10	Kasubbag Binprokeu
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen			3	3	3	3	3	15	Kasubbag Binprokeu
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prersentase administrasi keuangan daerah terpenuhi dalam satu tahun</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Sekretaris</b>
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	orang/bulan		72 org /14 bln	78 org /14 bln	78 org /14 bln	78 org /14 bln	80 org /14 bln	82 org /14 bln	468 org /14 bln	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	dokumen		0	1000	1100	1200	1200	1200	5.700	Kasubbag Binprokeu
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang tersusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5	Kasubbag Binprokeu
2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang tersusun	dokumen		0	1	1	1	1	1	5	Kasubbag Binprokeu
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	dokumen	11	12	11	11	11	11	11	55	Kasubbag Binprokeu
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	dokumen		0	2	2	2	2	2	10	Kasubbag Binprokeu
<b>2.15.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi barang milik daerah</b>	%		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBUD) yang tersusun	dokumen		0	1	1	1	1	1	5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD yang tersusun	dokumen		0	2	2	2	2	2	10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang tersusun	dokumen		0	12	12	12	12	12	60	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah dalam satu tahun</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Sekretaris
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas terpenuhi	Stel		15	227		81		81	404	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dalam satu tahun (jenis)			4	4	4	4	4	4	20	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	org/kgt			80	82	82	82	84	410	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	org/kgt			5	5	5	5	5	25	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Sekretaris
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	jenis/bulan		4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	20/12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit		3	3	3	3	3	3	15	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	unit		4	4	4	4	4	4	20	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis/bulan		3	3	3	3	3	3	15	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	jenis/bulan		3	3	3	3	3	3	15	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13..01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	jenis/bulan		1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	5 / 12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	kgtn		120	120	120	120	120	120	600	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13..01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata	jenis		2	2	2	2	2	2	10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase pengadaan barang milik daerah dalam satu tahun</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Sekretaris</b>
2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit									Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional tersedia	unit		3	1	5	0	0	0	9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	unit		25	2		10		2	39	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit		5	7	5	5	5	5	5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap tersedia (unit)			8	4	5	5	5	5	24	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud di adakan				1					1	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan tersedia				2					2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor di adakan					2				2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Sekretaris
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim	surat		1000	1000	1000	1000	1000	1000	5000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	jns/bln		3/ 12	3/ 12	3/ 12	3/ 12	3/ 12	3/ 12	15/ 12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	jns/bln		1/ 12	1/ 12	1/ 12	1/ 12	1/ 12	1/ 12	5/ 12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	org/bln		51/12	51/12	51/12	51/12	51/12	51/12	255/12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase pemeliharaan barang milik daerah dalam satu tahun</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Sekretaris
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya			13	13	13	13	13	13	65	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara			58	45	45	45	45	45	225	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit		6	4	4	4	4	4	20	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit		5	35	35	35	35	35	175	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap tersedia (unit)	unit		30						30	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit		2	5	2	2	3	2	14	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit		51	2	2	2	2	2	10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit		17	17	17	17	17	17	85	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	<b>Meningkatnya Pelayanan Angkutan</b>	<b>Prosentase pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Pemalang</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>0,25</b>	<b>0,5</b>	<b>0,75</b>	<b>1</b>	<b>1,25</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>Ka. Dinas</b>
	<b>Meningkatnya Sarana prasarana perhubungan</b>	<b>level of service</b>	<b>Indeks</b>		<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>Ka. Dinas</b>
2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase kendaraan yang lulus uji kir</b>	<b>%</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>Ka. UPT PKB</b>
		<b>Persentase Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran sesuai standar</b>			<b>37,5</b>	<b>47,22</b>	<b>50,63</b>	<b>60,2</b>	<b>63,54</b>	<b>73,08</b>	<b>73,08</b>	<b>Ka. UTPP</b>
		<b>Persentase awak angkutan yang meningkat kompetesinya</b>			<b>35</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>Kabid Angkutan</b>
		<b>Persentase kendaraan angkutan umum yang laik jalan dan tertib administrasi</b>			<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>Kabid Angkutan</b>
		<b>Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik</b>			<b>76,85</b>	<b>77,78</b>	<b>80,54</b>	<b>83</b>	<b>85,33</b>	<b>85,72</b>	<b>85,72</b>	<b>Kabid Lalu Lintas</b>
2.15.02.2.01	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase wilayah yang telah di tetapkan rencana induk LLAJ</b>			20	40	60	80	100			<b>Kabid Lalu Lintas</b>
		<b>Persentase titik pengawasan LLAJ</b>				100	100	100	100	100	100	<b>Kabid Lalu Lintas</b>

No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ tersusun	dokumen		1	1	1	1	1	0	4	Kasi Man LL
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Perbup Rencana Induk Jaringan LLAJ yang di tetapkan	dokumen		1	2	1	1	1	1	6	Kasi Man LL
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah titik pengendalian dan pengawasan LLAJ	Titik			20	20	20	20	20	100	Kasi Man LL
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota tersedia</b>			60	63	71	74	78	81	81	Kabid Lalu Lintas
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan Terbangun	unit	3	3	3	3	3	3	3	15	Kasi Sarpras
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan terbangun	unit	0	6	24	73	66	61	10	234	Kasi Sarpras
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan terpelihara	unit		29	32	35	38	41	44	190	Kasi Sarpras
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan terpelihara	unit	4	2016	2040	2113	2179	2240	2250	10.822	Kasi Sarpras
<b>2.15.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Persentase terminal penumpang tipe C yang sesuai standar</b>			<b>25</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>	<b>Ka. UTPP</b>
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah kajian rencana pembangunan terminal type C	dokumen			1					1	Kasubbag TU UTPP
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah gedung terminal yang di bangun	unit		0	0	1	0	0	0	1	Kasubbag TU UTPP
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terbangun	Unit		0	3	1	1	1	1	7	Kasubbag TU UTPP
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal terpelihara	unit		8	8	8	8	8	8	8	Kasubbag TU UTPP
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	orang		0	10	10	10	10	10	50	Kasubbag TU UTPP
<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Persentase penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir			50	56,94	63,75	70,45	77,08	83,65	83,65	Ka. UTPP

No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitas parkir terbangun	Unit		0	5	5	5	5	5	25	Kasubbag TU UTPP
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah titik parkir yang di lakukan pengawasan	Titik		350	400	450	500	550	600	2.500	Kasubbag TU UTPP
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase kendaraan diuji</b>			<b>65</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>Ka. UTP PKB</b>
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian tersedia	Unit	4	1	1	1	1	1	1	5	Kassubag TU UTP PKB
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah SDM pengujian yang mengikuti Diklat	Orang	1	0	4	4	4	4	4	20	Kassubag TU UTP PKB
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji di adakan	Unit	0	4.000	6.000	6.500	6.500	7.000	7.100	33.100	Kassubag TU UTP PKB
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peserta sosialisasi SOP Pengujian Kendaraan bermotor	Orang		0	200	200	200	200	200	1.000	Kassubag TU UTP PKB
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian terpelihara	Unit		11	11	11	11	11	11	55	Kassubag TU UTP PKB
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah koordinasi pengujian kendaraan bermotor				24	24	24	24	24	120	Kassubag TU UTP PKB
2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah perda retribusi Pengujian Kendaraan bermotor di terbitkan	Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	Kassubag TU UTP PKB
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen kajian SKM	Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Kassubag TU UTP PKB
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase masarakat yang menerima pengetahuan tentang lalu lintas</b>	<b>%</b>		<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>Kabid Lalu Lintas</b>
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rakayasa lalu lintas	Orang		800	800	800	800	800	800	4.000	Kasi Man LL
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Titik		15	16	17	18	19	20	90	Kasi Man LL
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta forum lalu lintas	Orang		200	250	300	350	400	450	1.750	Kasi Man LL
No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada	Penanggung jawab

(1)	(2)	(3)	(4)	Tahun 2020	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	akhir periode Renstra Perangkat Daerah	(13)
				Tahun 2021								
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	persentase pembangunan pusat kegiatan yang sudah mempunyai dokumen andalalin				80	80	80	80	80	80	Kabid Lalu Lintas
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Perbup Andalalin	Dokumen		0	1	0	0	0	0	1	Kasi Man LL
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	Orang		0	1	0	1	0	0	2	Kasi Man LL
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah pengawasan Dokumen Andalalin disuatu pusat kegiatan	Titik		0	10	15	20	25	30	100	Kasi Man LL
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase awak angkutan yang mengikuti pemilihan awak angktan teladan			20	20	20	20	20	20	20	Kabid Angkutan
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diramcek (Uji Petik)	Kendaraan			50	50	50	50	50	250	Kasi Dalops
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah posko mudik			2	2	2	2	2	2	10	Kasi Angkutan
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pemilihan awak angkutan teladan	Orang		40	40	40	40	40	40	200	Kasi Dalops
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang di inspeksi/ audit	Perusahaan			9	9	9	9	9	45	Kasi Dalops
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase awak angkutan yang mengikuti pemilihan awak angktan teladan			12,08	12,92	13,72	14,5	15,21	15,91	15,91	Kabid Angkutan
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan yang dioprasi	Kendaraan		1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	7.000	Kasi Dalop
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Trayek Angkutan Perkotaan dan Pedesaan			58,02	77,66	89,01	95,9	100	58,82	58,82	Kabid Angkutan
No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode	Penanggung jawab

					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Renstra Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek / Kartu Pengawasan yang di perbaharui	Kendaraan		322	109	63	38	23	300	533	Kasi Angkutan
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor di Bidang Angkutan/Perhubungan (kali)	Kali		30	30	30	30	30	30	150	Kasi Angkutan
<b>2.15.02.2.16</b>	<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase ketersediaan Dokumen Evaluasi Jaringan Trayek</b>			<b>39,13</b>	<b>60,87</b>	<b>86,96</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>	Kabid Angkutan
2.15.02.2.14.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi jaringan trayek tersusun	Dokumen		1	1	1	1	0	1	4	Kasi Angkutan
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Prosentase persyaratan pembangunan pelabuhan yang terpenuhi</b>	<b>%</b>		<b>80</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	
<b>2.15.03.2.13</b>	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>jumlah persyaratan pembangunan pelabuhan yang di penuhi</b>	Dokumen		1	1					1	Kabid Lalu Lintas
2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah kajian pembangunan pelabuhan yang di susun	Dokumen		1	1					1	Kasi Sarpas

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan untuk periode tahun 2021-2026 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan/atau target kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang ini.

Pemalang, September 2021

Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Pemalang



AMRUJLAH, S.IP., M.Si.

Pembina Muda TK I

NIP 19650215 198603 1 013